

ISSN 2655-9498



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

**WIDYA
AKUNTANSI DAN
KEUANGAN**

**VOLUME 03 NOMOR 01 TAHUN 2021
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**

DAFTAR ISI

PERHITUNGAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Made Sutrasmini, Anantawikrama Tungga Atmadja (1-10)

PROSEDUR PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

Wayan Arsane, Nyoman Ari Surya Darmawan (11-22)

PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN EARNING PER SHARE (EPS) TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2016-2018

Ni Made Indah Purwitasari, Ni Putu Yuria Mendra, Desak Ayu Sriary Bhegawati (23-32)

PENGARUH PROFESIONAL AUDITOR DAN ORIENTASI ETIKA TERHADAP WHISTLEBLOWING DENGAN SENSITIVITAS ETIS SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Sofyan Syamsuddin, Goso, Sahrir (33-49)

Fintech Dari Perspektif Perilaku User Dalam Penggunaan E-Wallet Dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)

Gusi Putu Lestara Permana, Hesty Pahlevy Setyo Rini, I Gusti Ngurah Darma Paramartha (50-70)

PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL DAN KETAATAN ATURAN AKUNTANSI TERHADAP KECENDRONGAN KECURANAGAN AKUNTANSI PADA LPD DIKECAMATAN MENGWI

Ni Komang Sumadi, Ni Made Dewi Kansa Putri (71-78)

PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

I Putu Deddy Samtika Putra, Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati (79-92)

PERAN KUALITAS AUDIT DALAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN KELUARGA DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DENGAN PENGHINDARAN PAJAK

Salma Afrilia, Masripah, Ermawati (93-111)

PERHITUNGAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Made Sutrasmini¹

Anantawikrama Tungga Atmadja²

^{1,2}Universitas Pendidikan Ganesha, email: anantawikrama_t_atmaja@undiksha@ac.id

ABSTRACT

The research aims to find out the progressive tax calculation mechanism for vehicles. The subject of this research is the office of UPTD Tax Service and the regional levy of Bali Province in Buleleng district and the object of progressive tax calculation mechanism of motor vehicles in increase regional revenue. Methods of data collection with documentation and observation methods are further analyzed with quantitative descriptive analysis techniques. Results of this study showed that the calculation mechanism of the vehicle Progressive tax in the office of UPTD Tax Service and Levy of Bali Province in Buleleng district, in conducting tax taxpayer payment requires progressive tax calculation mechanism of vehicle. Based on research results there are barriers to note that is lack of understanding of the mechanism of progressive tax calculation. The solution given to the constraints is to disseminate to the taxpayer regarding the mechanism of progressive tax calculation in tax payments.

Keyword: Tax; Vehicle; PAD

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara Berkembang tengah melaksanakan pembangunan disegala bidang baik bidang ekonomi, politik, sosial, dan bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan bangsa yang adil dan makmur. Setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu untuk mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Indonesia itu sendiri, salah satunya berasal dari pajak Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar oleh rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang, yang dimana uang pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan rakyat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak itu sendiri secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

Pajak adalah salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Pembayaran pajak ini sudah diatur oleh undang-undang sehingga setiap negara wajib untuk membayarkan pajak. Dalam UUD 19945 pasal 23 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pajak atau iuran wajib yang disetujui oleh rakyat bersama

dengan pemerintah. Meskipun pajak bersifat wajib, para wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pembayaran pajak yang dilakukannya. Namun, pemerintah wajib memberikan imbalan secara tidak langsung kepada rakyat dengan melakukan pembangunan sarana dan prasana secara merata demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia ada dua Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak kendaraan bermotor progresif adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari 1 unit. Kendaraan tersebut bias berupa mobil atau motor. Semakin banyak kendaraan pribadi yang dimiliki seseorang maka semakin besar pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan. Kebijakan tarif Pajak Progresif kendaraan bermotor diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan didaerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor ini dikenakan dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan asas kemampuan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Alasan ini muncul untuk mempersiapkan pemerintah dengan transportasi umum dengan makin tingginya angka kepemilikan kendaraan pribadi. Tanda dikenal dengan pajak progresif adalah adanya kode berupa angka di bagian atas STNK. Kode itu adalah menjadi bukti pembayaran pajak progresif kendaraan. Dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang nomor 2008 tahun 2009 Pajak daerah dan Retribusi daerah mengatur bahwa pajak progresif dikenakan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor pribadi baik roda dua maupun roda empat berdasarkan atas nama dan alamat pemilik yang berbeda, maka dikenakan tarif Pajak Progresif pajak ini tidak berlaku untuk kendaraan dinas pemerintahan dan kendaraan angkutan umum.

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Mekanisme Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat jasa secara langsung. Menurut UU No.28

tahun 2007 pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan. Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada undang-undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyat. Definisi pajak berdasarkan UU KUP tersebut diatas hamper sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro yang mendefinisikan yang mengemukakan pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Dr.Rochmat Soemitro, SH. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada pendapat jasa yang berlangsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak menurut UU. No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan UU NO.16 Tahun 2009 tentang ketentuan pajak dan Tatacara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada warga negara yang Terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya.

Menurut Undang-undang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah No.28 tahun 2009. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang berdasarkan unddang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan gigunkan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai peran penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.Menurut Direktorat Jendral Pajak Adapun empat fungsi Pajak sebagai berikut: Fungsi Anggaran (Budgetair) sebagai sumber pendapatan negara, fungsi pajak untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi Mengatur (Regulasi) Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kebijaksanaa pajak.Fungsi Stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah dapat menggunakan saran perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Fungsi Retiebusi Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan juga membiayai pembangunan sehingga dapat meiningkatkan pendapatan

Dalam buku Hukum Pajak yang ditulis oleh I Nyoman Putra Yasa pada Tahun 2017 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan istilah ECCE (Equality,Certainty,Convenience,Economy) yaitu: Equality/Persamaan Pemungutan pajak harus bersifat final adil dan merata. Artinya pajak dikenakan secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.Certainty/Kepastian Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Hal ini berkaitan dengan yudisiris, yakni adanya undang-undang yang melandasi pemungutan pajak. Convenience/kenyamanan Pajak hendaknya dipungut tidak menyulitkan wajib pajak. Artinya pajak yang dipungut tidak boleh mengganggu perekonomian, kelancaran ekonomi sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi.Economy /ekonomi. Pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien dan biaya pemenuhan kewajiban pajak tidak lebih besardari hasil pemungutan pajak

Menurut Mekari (2009) di Indonesia terdapat 3 jenis sistem perpajakan. Sistem Perpajakan di Indonesia sesuai dengan asas pemungutan pajak. Adapun 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu: Official Assessment System merupakan system pemungutan yang memberi kewenangan wajib aparaturnya untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Self Assessment System merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pada system ini wajib pajak lebih bersifat aktif mulai dari menghitung, dan melaorkan pajak sendiri yang terutang tanpa campur tangan aparaturnya, sehingga aparaturnya hanya mengawasi wajib pajak saja. With Holding System merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang dimana bertujuan untuk memotong besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Menurut Peraturan daerah Provinsi Bali nomor 1 Tahun 2011 Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua maupun lebih berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor ataupun peralatan yang lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk juga alat-alat besar yang bisa bergerak. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang atau mengangkut barang dengan dipungut bayaran, dimana kendaraan tersebut memiliki izin trayek, atau izin usaha angkutan atau kartu pengawasan. Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB ialah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.Kendaraan Pribadi

adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki baik orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau dengan menggunakan tanda motor kendaraan plat dasar hitam dan huruf warna putih. Adapun subjek dan objek kendaraan sebagai berikut: Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor, sedangkan wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor dan bertanggungjawab atas pembayaran pajak yang belaku. Objek Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah daerah Provinsi Bali No 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah, Objek Pajak ialah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagaimana angkutan orang atau barang di jalan umum, dikecualikan dari objek pajak kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor; Kereta api, Kendaraan bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara, Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah Pabrik atau importir yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau untuk dijual.

Menurut Hartika (2017) Pajak progresif adalah Pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor, baik berupa mobil maupun sepeda motor. Pajak progresif ini bertujuan untuk menerapkan prinsip keadilan dalam perpajakan, dimana orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar dengan direpresentasikan dengan memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu maka dikenakan pajak lebih besar. Dasar Hukum Peraturan Daerah Provinsi Bali No 1 Tahun 2011 perubahan ke 2 berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2019 Perubahan Ke 3 atas Perubahan Daerah No 1 Tahun 2011.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor dihitung dengan cara perkalian 2 (dua) unsur pokok. Dasar Pengenaan PKB sebagai perkalian: Nilai jual kendaraan diperoleh dari harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Jika tidak diketahui nilai jualnya maka ditentukan dari faktor-faktor lain seperti isi selinder (cc), jenis, merk, tahun pembuatan, Negara pembuatan, dan banyaknya jumlah penumpang yang diijinkan, dan dokumen untuk jenis kendaraan. Bobot kendaraan yang memcerminkan secara relative untuk kerusakan jalan, pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Masa Pajak Saat Pajak Terutang Dan

Suatu Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak kendaraan bermotor dikenakan masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung saat pendaftaran kendaraan bermotor Bagian dari bulan yang melebihi 15 hari dihitung satu bulan penuh. Kewajiban Pajak akan berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan besarnya pajak terutang berdasarkan jumlah bulan berjalan.

Tarif PKB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah sebagai berikut: Untuk Kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga di bawah 250 cc pertama sebesar 1,5% .Untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, kedua dan seterusnya sebagai diterapkan secara progresif yaitu: Kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2% , Kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 2,5% ,Kendaraan kepemilikan keempat sebesar 3% , Kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5%. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga 250cc keatas pertama serta kendaraan roda empat atau lebih pertama sebesar 1, 75%. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan tiga 250 cc ke atas pertama dan kendaraan bermotor roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud pada huruf c, kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif yaitu: Kendaraan kepemilikan kedua sebesar 3%, Kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 4,5%.Untuk kepemilikan Kendaraan kepemilikan keempat 6%, Kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya 6%. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai dengan identitas diri yang ditunjukkan dengan kartu tanda penduduk. Tarif PKB angkutan umum, ambulance, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah/pemerintah daerah, TNI, POLRI, dan Instansi Pemerintahan ditetapkan sebagai berikut: Kendaraan bermotor untuk umum sebesar 1%.Kendaraan bermotor ambulance kendaraan bermotor pemadam kebakaran ,kendaraan bermotor lembaga sosial keagamaan dan kendaraan bermotor pemerintah/pemerintah daerah, TNI, POLRI, dan instansi pemerintahan tidak dikenakan pajak secara progresif. Tarif PKB alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0, 2%. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah adapun cara perhitungan pajak progresif kendaraan bermotor sebagai berikut:

$$\text{Pajak Progresif} = \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{Tarif Kendaraan Bermotor}$$

METODE

Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng, yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Mekanisme Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kantor Bersama Samsat Buleleng). Berdasarkan penelitian yang dilakukan jenis data yang digunakan yaitu; Data Kuantitatif merupakan data yang berupa angka. Data kuantitatif dinyatakan dalam bentuk angka. Jenis data yang digunakan menurut sumbernya antara lain: Data Primer yaitu data yang langsung didapatkan melalui pimpinan atau karyawan yang berhak memberikan data mengenai Mekanisme Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kantor UPTD Pelayanan pajak dan Retribusi daerah Provinsi Bali Kabupaten Buleleng. Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari data-data yang sudah ada untuk menunjang penelitian yang berhubungan dengan Mekanisme Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian kali ini adalah: Observasi adalah proses yang mana cara pengumpulan data ini adalah dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diamati dengan melihat dan menghimpun data yang berkaitan dengan Mekanisme Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pimpinan atau dengan karyawan yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen perusahaan mengenai Mekanisme Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Buleleng sudah menggunakan sistem yang mempermudah dalam perhitungannya. Hal pertama yang dilakukan untuk mengetahui pengenaan pajak progresif yaitu wajib pajak menginput NIK KTP atau bisa Nomor Kartu Keluarga dan untuk warga Negara Asing bisa dilakukan dengan menginput Nomor PASPORT. Setelah menginput langkah tersebut maka secara otomatis perhitungan pajak progresif akan muncul pada sistem. Apabila wajib pajak memiliki 1 kendaraan roda dua maka tidak dikenakan pajak progresif dan apabila wajib pajak memiliki lebih dari 1

kendaraan bermotor maka wajib pajak dikenakan pajak progresif. Pajak Progresif ialah tarif pajak dengan persentase yang besar seiring dengan banyaknya penghasilan yang diterima sebagai dasar perhitungan pajak. Adapun tarif pajak kendaraan roda dua untuk kepemilikan pertama sebesar 1,5% , kepemilikan ke dua sebesar 2%, kepemilikan ketiga 2,5% , kepemilikan ke empat sebesar 3% dan kepemilikan ke lima dan seterusnya sebesar 3,5% . Untuk tarif kendaraan roda empat kepemilikan pertama sebesar 1,75%, kepemilikan ke dua sebesar 3% , kepemilikan ke tiga sebesar 4,5% , kepemilikan ke empat sebesar 6,0 % dan kepemilikan ke lima dan seterusnya sebesar 7,5%. Data perhitungan Pajak progresif kendaraan bermotor pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng.

Dari data tersebut mekanisme perhitungan pajak progresif kendaraan bermotor pada UPTD Pelayanan pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng.

Tabel 1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

No Polis i	Plat	Tangga l Akhir PKB	Nama Pemilik	Alamat	Merk KB	Type KB	Jenis KB	DP PKB	SWDKL LJ
DK-1143-UU	Hitam	2020-08-15	Nengah Rupini	Br. Dinas Kelod, Ds.Kedis, Kec.Busu ngbiu, Kab. Buleleng.	Honda	Brio Satya DD11 2E MTC KD	Minibus	115.500.000	143.000

Sumber: Data Diolah

Perhitungan Pajak Progresif dapat dihitung dengan rumus. Berikut adalah contoh kasus perhitungan dari pajak progresif:

$$\begin{aligned}
 \text{PKB} &= \text{DP PKB} \times 1,75 \% = 115.500.000 \times 1,75\% = 2.021.250.000 \\
 \text{SWDKLLJ} &= 143.000 \\
 \text{Jumlah} &= 2.164.250.000
 \end{aligned}$$

Analisis : Untuk perhitungan di atas diketahui Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (DP PKB) sebesar Rp 115.500.000, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang selalu di bayarkan saat wajib pajak melakukan pembayaran sebesar Rp 143.000, dan tarif Pajak kendaraan bermotor sebesar 1,75%, jadi untuk

menghitung Pajak progresif yaitu dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dikalikan dengan tarif pajak kendaraan bermotor sehingga mendapatkan hasil sebesar Rp 2.021.250.000, kemudian hasil tersebut ditambahkan dengan SWDKLLJ yang dikelola oleh jasa raharja, sehingga mendapatkan hasil sebesar Rp 2.164.250.000. Jadi wajib pajak harus membayar pajak sebesar Rp 2.164.250.000.

Mekanisme Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah, dilihat dari hasil penelitian ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 9 tahun 2019 tentang Pajak Progresif yang ditetapkan, namun banyak kekurangan dalam sosialisasi tentang bagaimana pentingnya Mekanisme Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dan wajib pajak juga belum teliti dalam mengecek STNK yang mereka miliki terutama yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari 2 padahal mereka harus membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan perhitungan pajak progresif yang telah ditentukan.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Mekanisme Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 9 tahun 2019 tentang Pajak Progresif. Hal pertama dilakukan untuk menghitung pajak progresif yaitu dengan cara menginput NIK KTP / Nomor Kartu Keluarga dan untuk warga negara asing dengan menginput Nomor PASPORT, setelah memasukan langkah tersebut maka akan muncul secara otomatis di sistem.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, adapun saran yang disampaikan atas hasil penelitian di Kantor Bersama Samsat Buleleng yang diharapkan untuk memepertahankan kinerja dalam pelayanan-pelayanan bagi wajib pajak serta dapat mensosialisasikan mengenai Mekanisme Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor. erisi simpulan dan saran. Simpulan memuat jawaban atas pertanyaan penelitian. Saran-saran mengacu pada hasil penelitian dan berupa tindakan praktis, sebutkan untuk siapa dan untuk apa saran ditujukan. Ditulis dalam bentuk essay, bukan dalam bentuk numerikal

DAFTAR PUSTAKA

Ardo. 2020. "Apa itu Pajak Progresif" Dipublikasi dari <https://www.moneyfazz.id/pajak-progresif> Diakses pada tanggal 20 Juni 2020

- Aditya, Dwi Kelvin. 2019. “Pentingnya Pembayaran Pajak untuk Negara” Dipublikasi dari <https://www.pajakku.com/red5da0354b0c56747b29/Penting-Pembayaran-Pajak-untuk-Negara> Diakses Pada tanggal 3 Juli 2020
- Direktorat Jendral Pajak. Tt. “Fungsi Pajak”. Dipublikasi dari <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak/> Diakses pada tanggal 20 April 2020
- Hartika. 2017. “Pengertian Pajak Progresif ” Dipublikasi dari <https://www.google.co./amp/s/www/finansialku.com/pajak-progresif-kendaraan/amp/> Diakses 20 Juni 2020
- Islamy. 2003. “Pengertian Implikasi”. Dipublikasi dari <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implikasi/> Diakses pada tanggal 6 Juni 2020
- Maulida.2018. “Jenis Tarif Pajak” Dipublikasi dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajapay/tarif-pajak> Diakses pada tanggal 20 April 2020
- Mekari. 2009. “Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia” Dipublikasi dari <https://klikpajak.id/blog/lapor-pajak/3sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia> Diakses pada tanggal 20 April 2020
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Dipublikasi dari <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id> diakses pada tanggal 24 April 2020
- Praturan Daerah Provinsi Bali No 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No 9 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No 28 Tahun 2009 Tentang Pengenaan Pajak Progresif
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
- Yasa, I N. P. (2017). Hukum Pajak. Ed. Revisi. Singaraja: Undiksha Press

PROSEDUR PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

Wayan Arsane¹

Nyoman Ari Surya Darmawan²

^{1,2}Universitas Pendidikan Ganesha, email: arisuryadharmawan@undiksha.ac.id.

ABSTRACT

This research aims to know the procedures of the people's Business Credit distribution (KUR) at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Goris. The Data used is qualitative in the form of KUR file, KUR analysis, and the organizational structure of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Goris and its duties. The subject of this research is PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Goris, and the object of this research is KUR dispensing procedure. Data collection methods are conducted by interview techniques, observations and documentation. The Data obtained is analyzed by using a qualitative descriptive. The results of this study showed that the channeling procedure of Usaha Rakyat at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Goris has been done well by BRI Unit Goris.

Keyword: Business Credit, Bank, KUR

PENDAHULUAN

Prosedur merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya agar memperoleh hasil sama dari keadaan yang sama. Tujuan Prosedur adalah untuk dapat membantu seseorang agar dapat memahami cara melaksanakan atau membuat sesuatu dengan baik dan tepat. Sedangkan Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang mempunyai peran penting bagi kelangsungan perekonomian Indonesia. Bank juga merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito kemudian menyalurkan dana dalam bentuk kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Bank juga sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang dan menerima pembayaran dalam segala bentuk, mulai dari pembayaran listrik, telepon, uang kuliah, dan lainnya. Bank sangat amat dibutuhkan masyarakat oleh karena itu aktivitas dan penyelenggaraan kegiatan perbankan harus secara selaras, teratur dan terencana mengacu kepada kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya peraturan Bank Indonesia (Suhardi, 2016).

Berdasarkan undang-undang no. tahun 1992 tentang perbankan, fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana pada masyarakat dalam

bentuk kredit. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan kembali pembayaran dengan jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan jumlah bunga atau pembagian hasil dan keuntungannya (cahyono,2010). Sedangkan menurut (Amanda, 2015) Kredit adalah sumber utama penghasilan bagi bank yang merupakan sumber operasi terbesar, sebgaiian besar dana operasional dibuat dalam bentuk kredit . dengan kegiatan tersebut berhasil maka usaha bank pun berhasil. Namun bila bank banyak terjerat kredit bermasalah, hal ini akan berpengaruh besar bagi operasional bank. Kredit yang akan diberikan berdasarkan kepada kepercayaan. Sehingga dengan demikian, penyaluran kredit merupakan penyaluran kredit. Ini bearti bahwa bank akan percaya menyalurkan kredit kalau penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan layanan dari bank untuk menunjang perekonomian rakyat melalui peminjaman modal usaha (Karyada, 2020). Secara umum, KUR terbagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan klasifikasi usaha atau UMKM yaitu KUR mikro, KUR kecil dan KUR khusus. Pembiayaan dari KUR dapat memberikan tambahan untuk modal kerja bulan pertama. Kebijakan KUR baru mulai dengan adanya keputusan Rapat kabinet terbatas yang diadakan pada tanggal 9 maret 2007 bertempat dikantor kementerian negara koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang saat itu masih dipimpin oleh Bapak Presiden RI Susilo bambang Yudhyono . dalamn sidang tersebut salah satu kebijakan yang diambil kala itu adalah, bahwa sebagai salah satu bentuk upaya pengembangan usaha Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi, pemerintah akan mendorong peningkatan akses pelaku UMKM dan koperasi kepada kredit atau pembiayaan melalui perbankan dengan peningkatan kapasitas Perusahaan Penjamin. Kredit Usaha Rakyat digulirkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007 kemudian didukung oleh Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 - 2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR ini, berbagai kemudahan bagi pelaku kegiatan UMKM pun ditawarkan oleh pemerintah. Beberapa di antaranya adalah tentang bagaimana penyelesaian kredit bermasalah UMKM. Ketetapan Menteri keuangan No 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan KUR.

Supaya kredit yang diberikan tersebut lancar, maka pihak bank harus selektif dalam memberikan kredit pada kreditur, dimana sebelum kredit di berikan kepada debitur maka pihak bank harus menganalisa pemberian kredit tersebut untuk menentukan kesanggupan kreditur membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman tersebut. Oleh karena itu, bank harus bisa menetapkan prosedur atau proses pelaksanaan kredit serta mengantisipasi masalah–masalah yang timbul terhadap kredit macet. Karena itu akan berpengaruh pada aktivitas perbankan itu sendiri terutama terhadap kerja operasional bank dalam penyaluran kredit untuk kesejahteraan masyarakat. Maksud dan tujuan pemerintah atas kebijakan KUR untuk mempercepat pengembangan yang benar serta pemberdayaan UMKM, dalam mengangkat akses pembiayaan kepada UMKM, Koperasi sebagai mengatasi kemiskinan dan membuka peluang kesempatan kerja (Wijaya, 2016).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan untuk usaha produktif dan layak (feasible) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan (Widiastuti, 2017). Sedangkan menurut (Haryana, 2014) sasaran pelaksanaan dari program KUR adalah golongan masyarakat yang telah diberikan pelatihan yang terus ditingkatkan dalam pemberdayaan serta kemandiriannya pada alokasi program sebelumnya. keinginanya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti BRI, Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya. Melihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi). Sasaran utama pelaksanaan KUR adalah semua sektor usaha yang menghasilkan (produktif). Dengan ditetapkannya Peraturan pelaksanaan KUR berikut dengan beberapa kebijakan pendukungnya, maka pemerintah mengharapkan dengan penyaluran KUR oleh Bank Nagari dapat dijalankan dengan baik dan didukung serta pelaksanaan sepenuhnya oleh setiap pejabat hingga rencana penyaluran KUR tersebut dapat direalisasikan sebagaimana yang diharapkan.

UMKM dan koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha Produktif antara lain : Pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung , maksudnya UMKM dan koperasi dapat langsung mengakses KUR dikantor cabang atau kantor cabang

pembantu bank pelaksana, untuk mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui lembaga mikro, koperasi atau melalui kegiatan program lainnya dengan bank pelaksana.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Goris. Untuk objek penelitian kali ini adalah Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Goris, penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yakni yaitu data yang diukur secara tidak langsung dan tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka tetapi hanya berupa penjelasan mengenai prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat Indonesia (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Goris. Sumber data yang digunakan yakni data yang diperoleh langsung dari perusahaan melalui pimpinan atau karyawan yang berhak memberikan data mengenai prosedur penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Goris yang disebut data primer dan sekunder. Kemudian peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi, Selanjutnya peneliti menganalisa data dengan metode analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis yang menggambarkan suatu keadaan atau kenyataan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan pada variable yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Awal mulanya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah Oleh Rden Bei Aria Wirjaatmadja tanggal 16 Desember 1895 dengan nama Hulpen Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren (Bank Bantuan dan simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia/pribumi).

Pada Periode setelah Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 pasal 1 disebutkan bahwa Bank Rakyat Indonesia Adalah sebagai Bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang

mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan Bank Rakyat Indonesia sempat berhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.

Pada waktu itu melalui PERPU No.41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandesche maatschaap*. Akhirnya penetapan Presiden No. 9 Tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan koperasi Tani dan Nelayan.

Kemudian lewat selama satu tahun, keluar penpers no. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesi. dalam ketentuan itu, Bank indonesia urusan koperasi, tani dan nelayan diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit I bidang Rural sedangkan *Nederlandesche maatschaap* menjadi Bank Indonesia II bidang ekspor dan impor.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan peraturan pemerintah RI No.21 tahun 1992 Status Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, pemerintah indonesia memutuskan menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai saat ini.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Mempunyai unit kerja yang kurang lebih berjumlah 4.578 buah yang salah satunya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.unit goris. Pada awalnya berdiri BRI unit Goris Tahun 2000 sebelum menjadi unit, dulunya bernama Pos Pelayanan Desa (PPD) induk nya di gerokgak, setelah 2 tahun berjalan tahun 2000 berdiri sendiri menjadi unit Goris.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian penulis di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Goris yang dilakukan pada tanggal 15-17 juni 2020 dan serta wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala Unit, maka penulis dapat mengemukakan bahwa proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Permohonan Kredit

Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis kepada pihak BRI Unit Goris. Calon debitur KUR datang ke kantor BRI Unit Goris, kemudian Nasabah Mengajukan KUR dibantu oleh customer service. Calon debitur mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian calon debitur menandatangani.

Calon debitur kredit usaha rakyat diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang harus dilakukan pun sederhana. Syarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa (KTP) Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga (KK), Surat keterangan Usaha.

Table 1. Persyaratan KUR Mikro

Keterangan	Persyaratan
Calon Debitur	Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak
Usaha	Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 Bulan
Besar Kredit	Maksimal Rp. 25 Juta
Jenis Pinjaman Kredit	<ul style="list-style-type: none"> • Kredit Modal Kerja (KMK) dengan jangka waktu maksimum 3 tahun • Pinjaman Investasi (KI) dengan jangka waktu maksimum 5 tahun
Suku Bunga	Suku bunga efektif 7% per tahun atau setara dengan suku bunga flat 0,41% per bulan
Provisi/administrasi	Tidak dipungut Biaya
Persyaratan Administrasi	KTP, KK Dan Surat Ijin Usaha

Sumber: <https://bri.co.id/kur>

b. Tahap Pemeriksaan/Tahap Analisis Kredit

Dalam sistem penyaluran Kredit pada Bank BRI adalah tahap pemeriksaan dan analisis kredit. Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah berkas-berkas yang sudah lengkap sesuai persyaratan. Pada tahap pemeriksaan, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BRI Unit Goris dalam hal ini Mantri akan melihat serta meninjau langsung

kelengkapan tentang layak atau tidak calon debitur kredit usaha rakyat diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR tersebut antara lain:

1) Mencocokkan fotocopi bukti diri/identitas lain sesuai dengan aslinya.
2) Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur kredit usaha rakyat. Misalnya tentang modal, tentang usaha, tentang pinjaman pada pihak lain,dll. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengendalikan pinjaman atau tidak. Berdasarkan arahan Bank Indonesia Sebagaimana termuat dalam SK direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut:

1) Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.

2) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini bearti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi dari pemohon, namun harus didasarkan atas penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang diberikan secara bersama-sama oleh bank.

3) Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi;

- Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data dari pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet,

- Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya mark up yang dapat merugikan bank,

- Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.

4) Analisa kredit harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul.

5) Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai bank induk.

Bagaimana arahan diatas, tetap terbuka peluang bagi bank-bank untuk mengatur kebijakan kreditnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bank itu sendiri. BRI (persero) unit Goris dalam melakukan analisa kredit pun mempunyai kebijakan sendiri yang tentunya

berpedoman pada arahan Bank Indonesia. Laporan keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis.

c. Tahap Pemberian Putusan Kredit

Calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak BRI (persero) Unit Goris akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali sekitar satu sampai dua hari (Pengajuan kredit di BRI Unit tidak boleh lama sejak sejak pendaftaran dengan putusan bank tidak lebih dari 7 hari).

Setelah itu mantri sebelum pemberian putusan kredit, kepala unit Bri (persero) Unit Goris wajib memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian putusan kredit masih berlaku lengkap, sah dan memiliki kekuatan hukum.

d. Tahap Pencairan Kredit/Akad Kredit

Pencairan Kredit (Thomas Suyatno, dkk.2007:85) yang telah disetujui dapat dilakukan dengan alat-alat dan cara yang ditentukan oleh bank, antara lain pencairan dengan menarik cek atau giro bilyet, kuitansi. Dengan dokumen-dokumen yang oleh bank dapat diterima sebagai perintah pembayaran, atau dengan beban rekening pinjaman nasabah. Tahap pencairan kredit meliputi beberapa tahap yaitu tahap pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit, flat bayar dan pembayaran pencairan kredit.

Adapun penjelasan mengenai langkah-langkah pada tahap akad kredit adalah sebagai berikut :

1. Persiapan pencairan

Setelah surat keterangan permohonan pinjaman diputus, costumer service mencatat pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut:

- 1) Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KUR telah mendapat persetujuan atau putusan tanggal pencairan.
- 2) Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH).
- 3) Mengisi kuitansi pencairan KUR.

2. Menandatangani Perjanjian Pencairan KUR

Berkas pencairan disini adalah Surat Pengakuan Hutang, customer service harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit usaha rakyat telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan. Setelah itu, customer service meminta debitur untuk membaca dan memahami Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan menandatangani surat tersebut. Selanjutnya diserahkan kepada kepala unit BRI untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka customer service mencocokkan tanda tangan debitur dengan waktu awal pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepala unit BRI untuk di flat bayar.

3. Flat Bayar

Kepala unit memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan isi berkas kredit usaha rakyat untuk disesuaikan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah itu maka kepala unit membutuhkan tanda tangan sebagai persetujuan flat bayar. Setelah selesai, kwitansi diserahkan pada teller dan berkas diserahkan pada customer service.

4. Pembayaran Pencairan KUR Tanpa Jaminan

Pembayaran Pencairan kredit usaha rakyat kepada debitur dilakukan oleh teller berdasarkan kwitansi yang diterima dari kepala unit BRI dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kwitansi.

Apabila terjadinya keterlambatan pencairan dana kredit usaha rakyat, maka disebabkan oleh banyaknya peminat yang hendak menjadi calon debitur kredit usaha rakyat, mengingat jumlah tenaga kerja yang menangani kredit usaha rakyat tidak sebanding dengan jumlah peminat kredit usaha rakyat.

Pembahasan

Pihak bank dalam melaksanakan Prosedur penyaluran kredit harus merumuskan dan melakukan kebijakan kredit yang sehat. Kebijakan ini dilakukan untuk menciptakan kebijakan kredit yang sesungguhnya dan juga meminimalisir resiko yang terdapat dalam setiap pemberian kredit. kredit yang diterapkan Bank BRI (persero) Unit Goris terdiri dari beberapa tahap seperti tahap permohonan kredit, tahap pemeriksaan atau analisis kredit, tahap pemberian putusan kredit, dan tahap pencairan kredit/akad kredit. Selain itu, prosedur penyaluran kredit juga melibatkan beberapa bagian didalamnya, yaitu Kepala Unit BRI, Mantri, Customer service, dan Teller.

Prosedur penyaluran kredit usaha rakyat pada BRI (persero) unit goris dalam tahap permohonan kredit, permohonan kredit tersebut berbentuk perjanjian baku dimana formulir sudah disediakan oleh pihak bank, dengan demikian calon debitur hanya tinggal bagian yang kosong yang perlu diisi dengan bantuan customer service kemudian di tandatangani oleh pemohon tanpa adanya proses negosiasi syarat-syarat yang ada dalam permohonan tersebut, perjanjian pengikat pun demikian yaitu surat pengakuan hutang. Apabila dilihat dari bentuk perjanjian nya maka termasuk perjanjian bentuk baku dimana isi atau klausa-klausa dalam perjanjian tersebut telah ditentukan terlebih dahulu pihak bank dan tidak terikat dalam bentuk tertentu. Perjanjian baku seperti ini tidak mengurangi keabsahan dari perjanjian kredit tersebut.

Prosedur penyaluran kredit usaha rakyat di BRI (persero) unit Goris sudah diterapkan dengan baik, dilihat dari tahap-tahap dalam prosedur penyaluran kreditnya sudah sesuai dengan Lembaga Keuangan lainnya. Prosedur penyaluran kredit dimulai dari mengajukan permohonan kredit, dalam hal ini calon debitur mengisi fomulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan oleh bank dan calon debitur KUR diharuskan memenuhi persyaratan yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa foto copy KTP, foto copy KK Dan surat keterangan usaha. Selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan permohonan KUR oleh Mantri . Apabila data sudah lengkap maka akan dilanjutkan ketahap selanjutnya, akan tetapi apabila data belum lengkap maka nasabah diminta untuk melengkapi data permohonan sampai batas waktu yang ditentukan. Setelah data lengkap maka akan dilakukan analisis dengan menggunakan Prinsip analisis 5C, yaitu Character, Capasity, Capital, Collateral, Condition of Social and Economy.

Setelah dilakukan analisis terhadap permohonan kredit dan hasilnya sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan selanjutnya adalah tahapan pemberian putusan kredit. putusan kredit dalam hal ini adalah keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur, dan pihak Bank akan mengkonfirmasi kembali beberapa hari yang telah ditentukan biasanya 3-5 hari setelah pendaftaran permohonan kredit usaha rakyat. Selanjutnya adalah pencairan kredit, pencairan kredit dilakukan beberapa tahap yaitu tahap persiapan kredit, tahap penandatanganan perjanjian pencairan kredit, tahap flat bayar, dan tahap pencairan KUR.

SIMPULAN DAN SARAN

Proses proses penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : tahap permohonan kredit, tahap pemeriksaan atau tahap analisis kredit , tahap pemberian putusan kredit, serta tahap pencairan kredit/akad kredit. calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat serta tertulis beserta syarat-syarat lain yaitu Fotokopi KK, fotokopi KTP serta surat keterangan usaha dari kepala daerah kepada pihak BRI (persero) Unit goris. Setelah syarat-syarat dilengkapi, BRI (persero) unit goris akan melakukan peninjauan langsung kepada calon debitur termasuk usaha calon debitur. BRI (persero) unit goris akan memberikan putusan atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, setelah itu adalah tahap pencairan atau akad kredit, dalam tahap ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan pencairan, tahap penandatanganan perjanjian pencairan, flat bayar serta pembayaran pencairan kredit usaha rakyat. Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah surat pengakuan hutang, dengan tandatangansuray pengakuan hutang oleh kedua belah pihak maka tahap-tahap dalam proses prosedur penyaluran kredit usaha rakyat telah selesai sehingga timbulah hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Adapun saran penelitian adalah sebagai berikut.

- Pemerintah diharapkan dapat menurunkan kembali tingkat bunga pada kredit usaha rakyat karena kredit usaha rakyat ini merupakan program pemerintah dalam membantu pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan dengan menyeleksi persyaratan dengan tepat menunjukkan bukti berupa pajak usaha.
- Untuk pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (persero).Tbk Unit Goris dalam hal ini pemantauan kredit harus lebih berhati-hati dan teliti kembali dalam mengawasi kredit yang telah dicairkan. Ini disebabkan untuk mencegah terjadinya penyelewangan terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, agar pembiayaan kredit yang diberikan tepat sasaran.
- Bagi mahasiswa agar melakukan pengambilan data sebaiknya tidak dilakukan disaat pihak perusahaan sedang sibuk, dilawatirkan akan mengganggu pekerjaan mereka, butalah perjanjian dengan salah satu pihak yang sesuai dengan data yang dibutuhkan, sehingga pihak tersebut tidak merasa terganggu.

- Bagi Universitas Pendidikan Ganesha agar mendukung dan memfasilitasi penelitian selanjutnya guna dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Andrianto.2020. MANAJEMEN KREDIT Teori dan Konsep Bagi Bank Umum. Jawa timur: Qiara Media.
- Anggraini, Dewi, and Syahrir Hakim Nasution. "Peranan kredit usaha rakyat (KUR) bagi pengembangan UMKM di Kota Medan (studi kasus Bank BRI)." *Ekonomi dan Keuangan* 1.3 (2013).
- Astawa, I Kadek. 2018. "Prosedur Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman Sumberkima".TA . FE, Akuntansi Program Diploma III, Universitas Pendidikan Ganesha, Buleleng.
- Karyada, I. P. F. (2020). Analisis Pendapatan Asli Desa Setelah Penetapan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1), 178-182.
- Hariyani. Iswi. 2010.Restruksi dan Penghapusan Kredit Macet. Jakarta: PT Elex Media komputido Kompas Gramedia.
- Mouchtar,Bustari., Dan Rose.Rahmidani., Dan Menik. Kurnia. Siwi. 2016. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Kencana.
- PRATAMA, DEO. "Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Nagari Cabang Padang." (2019).
- Sejarah BRI.(<https://bri.co.id>) (23 juni 2020 pukul 08.00)

PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN EARNING PER SHARE (EPS) TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2016-2018

Ni Made Indah Purwitasari¹⁾

Ni Putu Yuria Mendra²⁾

Desak Ayu Sriary Bhegawati³⁾

1),2),3) Universitas Mahasaraswati Denpasar, email: indahpurwitasari72@gmail.com

ABSTRACT

Stock returns are the results obtained from investment activities. Returns can be divided into two, namely realized returns (returns that occur or can also be referred to as actual returns) and expected returns (expected returns by investors). To find out the return obtained, the investor can assess the company's performance sourced from the company's financial statements. This study aims to determine the effect of Return On Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), and Earning Per Share (EPS) on Stock Return. The sample in this study were 70 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2018. Determination of the sample using a purposive sampling method, and obtained as many as 210. The analytical tool used is descriptive statistical analysis, the classic assumption test, multiple linear regression analysis and the model feasibility test. The results showed that the Return on Assets (ROA) and Earning Per Share (EPS) variables had a positive effect on stock returns. Even so, the Debt to Equity Ratio (DER) variable has no effect on stock returns.

Keywords: Stock return, return on assets, debt to equity ratio, earnings per share

PENDAHULUAN

Investasi di pasar modal menjadi salah satu cara berinvestasi yang banyak diminati oleh para investor di Indonesia. Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, *public authorities*, maupun perusahaan swasta (Husnan, 2015 & Karyada, 2017). Investasi saham di pasar modal memiliki daya tarik sendiri bagi para investor, karena menjanjikan dua keuntungan dalam investasi saham pada perusahaan yang sudah *go public*, yaitu dividen dan *capital gain*. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai investor dalam kegiatan investasi pasar modal adalah untuk

mendapatkan keuntungan (*return*) yang optimal. Investor sering kali hanya terfokus pada pengharapan mereka untuk mendapatkan *return* yang tinggi atas investasi yang dilakukan dan kurang memperhatikan faktor risiko. Padahal, *return* yang diharapkan investor mempunyai hubungan positif dengan tingkat risiko yang dihadapi, artinya semakin besar risiko yang harus ditanggung, maka semakin besar *return* yang dikompensasikan (Hartono, 2015).

Pada dasarnya nilai *return* dari setiap sekuritas berbeda-beda satu sama lainnya. Tidak semua sekuritas akan memberikan *return* yang sama bagi para investor. *Return* dari suatu sekuritas ditentukan oleh banyak hal seperti kinerja perusahaan dan strategi perusahaan mengelola laba yang dimiliki. Perusahaan dianggap gagal dalam mengelola keuangannya jika perusahaan tersebut tidak mampu membayar kewajibannya pada waktu jatuh tempo meskipun total aktiva melebihi total kewajibannya pada waktu jatuh tempo. Kondisi yang membuat para investor dan kreditur merasa khawatir jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) yang mengarah pada kebangkrutan. *Return* saham merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi. *Return* dibedakan menjadi dua, yaitu *return* realisasi (*return* yang terjadi atau dapat juga disebut sebagai *return* yang sesungguhnya) dan *return* ekspektasi (*return* yang diharapkan oleh investor) (Hartono, 2015). *Return* saham terdiri atas *capital gain* dan dividen. Untuk mengetahui *return* yang diperoleh, maka investor dapat menilai kinerja perusahaan yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan bersangkutan. Harapan untuk memperoleh *return* juga terjadi dalam *asset financial*. Suatu *asset financial* menunjukkan kesediaan investor menyediakan sejumlah dana pada saat ini untuk memperoleh sebuah aliran dana pada masa yang akan datang sebagai kompensasi atas faktor waktu selama dana ditanamkan dan risiko yang ditanggung. Harapan untuk memperoleh *return* yang maksimal tersebut diusahakan agar dapat terwujud dengan mengadakan analisis upaya tindakan-tindakan yang berkaitan dengan investasi dalam sahamnya. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi *return* saham sehingga harapan untuk memperoleh *return* yang maksimal bisa dicapai.

Analisis *return* saham dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan dasar yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Halim (2015) mendefinisikan analisis fundamental adalah lebih membandingkan antara suatu harga pasar dan saham untuk menentukan apakah harga pasar saham sudah bisa mencerminkan nilai intrinsiknya atau belum. Dimana nilai intrinsik ini ditentukan oleh faktor fundamental. Didalam analisis

fundamental terdapat beberapa rasio keuangan yang dapat mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Semakin baik kinerja keuangan perusahaan yang tercermin dari rasio-rasionya maka semakin tinggi *return* saham perusahaan, demikian juga jika kondisi ekonomi baik, maka refleksi harga saham akan baik pula. Perkembangan yang terjadi inilah yang salah satunya menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji lebih mendalam faktor-faktor apa sajakah yang diperkirakan dapat mempengaruhi *return* saham pada industri tersebut. Penelitian mengenai *return* saham telah banyak dilakukan mengingat pentingnya faktor fundamental dalam mempengaruhi nilai *return* saham. Namun berdasarkan bukti empiris yang menghubungkan faktor-faktor fundamental dengan *return* saham masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk membuktikan bagaimana pengaruh ketiga faktor fundamental tersebut (ROA, DER, EPS) terhadap *return* saham terutama pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* (ROA), *Debt to Equity Ratio* (DER), dan *Earning Per Share* (EPS) terhadap *Return Saham* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018.

Informasi tersebut bisa berupa laporan keuangan, informasi kebijakan perusahaan maupun informasi lain yang dilakukan secara sukarela oleh manajemen perusahaan. Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal-sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan keuangan akan dapat mempengaruhi investor terkait dalam pengambilan keputusan investasi. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lainnya yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lainnya (Hartono, 2012).

Return On Asset (ROA) merupakan rasio digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Jika ROA semakin meningkat, hal ini berarti menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik dan para pemegang saham akan memperoleh keuntungan dari dividen yang diterima. Dengan semakin meningkatnya dividen yang diterima oleh para pemegang saham akan menjadi daya tarik tersendiri untuk tetap menanamkan sahamnya dan para calon investor juga akan tertarik untuk menanamkan sahamnya kedalam perusahaan tersebut.

H1 : *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap *return* saham

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara keseluruhan hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditur) dengan pemilik perusahaan (Kasmir, 2016:157). Semakin besar nilai DER menandakan bahwa struktur permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan hutang-hutang relatif terhadap ekuitas. Semakin tinggi DER mencerminkan risiko perusahaan yang relatif tinggi, akibatnya para investor cenderung menghindari saham-saham yang memiliki DER yang tinggi.

DER yang terlalu tinggi mempunyai dampak buruk terhadap kinerja perusahaan, karena tingkat hutang yang semakin tinggi menandakan beban bunga perusahaan akan semakin besar dan mengurangi keuntungan. Sehingga semakin tinggi hutang (DER) cenderung menurunkan *return* saham.

H2 : *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh negatif terhadap *return* saham

Earning Per Share (EPS) merupakan suatu rasio yang menunjukkan jumlah laba yang didapatkan dari setiap lembar saham yang ada (Kasmir, 2016:207). Semakin tinggi nilai EPS akan menguntungkan pemegang saham karena semakin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham. *Earning Per Share* (EPS) menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diberikan perusahaan kepada investor dari setiap lembar saham yang dimilikinya.

Pada umumnya, investor akan mengharapkan manfaat dari investasinya dalam bentuk laba per lembar saham, karena *Earning Per Share* (EPS) ini menggambarkan jumlah keuntungan yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa, sedangkan jumlah *Earning Per Share* (EPS) yang akan didistribusikan kepada investor saham tergantung pada kebijakan perusahaan dalam hal pembayaran dividen. Semakin tinggi nilai *Earning Per Share* (EPS) menunjukkan semakin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham. Jika *Earning Per Share* (EPS) yang dihasilkan perusahaan meningkat, maka permintaan akan saham juga semakin meningkat. Hal tersebut juga akan meningkatkan *return* saham.

H3 : *Earning Per Share* (EPS) berpengaruh positif terhadap *return* saham

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penelusuran di situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id, dan Perusahaan Manufaktur merupakan perusahaan yang relatif banyak terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka yang dapat menafsirkan atau dapat dinyatakan dan diukur dengan satuan hitung (Sugiyono, 2017:13). Dalam penelitian ini data kuantitatifnya adalah laporan keuangan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dijadikan sampel yaitu data *Return Saham*, *Return On Asset*, *Debt to Equity Ratio* dan *Earning Per Share*. 2) Data Kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar (Sugiyono, 2017:14). Data kualitatif dalam penelitian ini adalah daftar perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen perusahaan dan laporan lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini (Sugiyono, 2017:203). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan yang diakses melalui situs PT. Bursa Efek Indonesia melalui website www.idx.co.id.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menentukan persamaan regresi yang menunjukkan pengaruh *Return On Asset* (ROA), *Debt to Equity Ratio* (DER), dan *Earning Per Share* (EPS) terhadap *Return Saham* pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2016-2018, dengan menggunakan *Statistic Package for Social Science* (SPSS).

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig	Colinearity Statistics	
	B	Std Error				Tolerance	VIF
Constant	-0,017	0,163		-0,104	0,917		
ROA	2,760	1,144	0,144	2,412	0,017	0,882	1,134
DER	0,034	0,070	0,029	0,490	0,624	0,921	1,085
EPS	0,002	0,000	0,606	10,525	0,000	0,950	1,052

Sumber : Data Diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 1 dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$R_{it} = -0,017 + 2,760ROA + 0,034DER + 0,002EPS + e.....(1)$$

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa koefisien regresi untuk variabel independen *Return On Asset* (X1) sebesar 2,760 dan nilai t hitung sebesar 2,412 dengan nilai signifikansi 0,017 yaitu lebih kecil dari 0,05 atau $0,017 \leq 0,05$. Hal ini berarti *Return On Asset* berpengaruh positif terhadap *return* saham. ROA berpengaruh positif terhadap *return* saham dikarenakan ROA dapat memberikan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari optimalisasi penggunaan aktiva yang dimiliki untuk operasional perusahaan kepada pengguna laporan keuangan khususnya investor. Kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktiva akan berdampak terhadap harga saham serta pemegang saham. ROA yang semakin tinggi menggambarkan kinerja perusahaan yang semakin baik dan para pemegang saham akan mendapatkan keuntungan dikarenakan meningkatnya harga saham maupun *return* saham. Sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi yang diberikan ROA berpengaruh positif terhadap *return* saham dan investor dapat menilai kinerja keuangan melalui ROA untuk pengambilan keputusan berinvestasi. Semakin besar nilai ROA maka semakin baik perusahaan menggunakan aktivanya untuk mendapatkan laba, hal ini membuat investor menjadi tertarik untuk membeli saham perusahaan serta berdampak pada harga saham yang meningkat dan diikuti dengan *return* saham yang tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darajat (2018), dan Novianti (2018) yang menyatakan bahwa *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap *return* saham.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa koefisien regresi untuk variabel independen *Debt to Equity Ratio* (X2) sebesar 0,034 dan nilai t hitung sebesar 0,490 dengan nilai signifikansi 0,624 yaitu lebih besar dari 0,05 atau $0,624 > 0,05$. Hal ini berarti *Debt to Equity Ratio* tidak berpengaruh terhadap *return* saham. DER tidak berpengaruh terhadap *return* saham, karena besar kecilnya DER tidak mempengaruhi *return* saham, hal tersebut terjadi karena ada pertimbangan yang berbeda dari investor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap perubahan DER yang bisa diketahui melalui analisis kinerja keuangan tidak berpengaruh penting terhadap perubahan tinggi rendahnya harga saham, sehingga tidak mempengaruhi pergerakan *return* saham. Pada dasarnya hutang perusahaan dapat dijamin dari modal yang ditanamkan oleh para investor, semakin banyak investor yang menanamkan modal, akan membantu perusahaan untuk menjamin hutangnya. Hal ini menunjukkan bahwa investor lebih tertarik memperhatikan faktor lain yang akan dijadikan

pertimbangan oleh investor untuk membeli saham perusahaan, karena investor lebih mempertimbangkan seberapa efektif perusahaan dalam hal mengelola modal perusahaan untuk meningkatkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan dibandingkan dengan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Laksono (2017) dan Hermawan (2018) yang menyatakan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh negatif terhadap *return* saham. Sedangkan hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Aziz (2012) dan Rahmadhini (2018), yang menyatakan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh terhadap *return* saham.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa koefisien regresi untuk variabel independen *Earning Per Share* (X3) sebesar sebesar 0,002 dan nilai t hitung sebesar 10,525 dengan nilai signifikansi 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 \leq 0,05$. Hal ini berarti *Earning Per Share* berpengaruh positif terhadap *return* saham. EPS berpengaruh positif terhadap *return* saham karena salah satu tujuan investor dalam melakukan investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. EPS yang semakin besar akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak semakin meningkat, dengan meningkatnya laba bersih setelah pajak yang dihasilkan oleh perusahaan maka *return* yang diterima oleh para pemegang saham juga semakin meningkat, sehingga membuat investor tertarik untuk menanamkan investasinya pada perusahaan tersebut. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Tandelilin (2010) yang menyatakan bahwa informasi EPS suatu perusahaan menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan bagi semua pemegang saham perusahaan. Teori yang dikemukakan oleh Darmadji dan Fakhrudin (2012) juga mendukung hasil penelitian ini yaitu EPS merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar keuntungan (*return*) yang diperoleh investor atau pemegang saham per lembar saham. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai EPS maka kemampuan perusahaan untuk memberikan pendapatan kepada pemegang sahamnya semakin tinggi pula. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Verawati (2011) dan Darajat (2018) yang menyatakan bahwa *Earning Per Share* (EPS) berpengaruh positif terhadap *return* saham.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, dan pembahasan yang telah diuraikan maka diperoleh kesimpulan bahwa : 1) *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap *return* saham. Hasil ini menunjukkan bahwa ROA yang semakin tinggi menggambarkan kinerja perusahaan yang semakin baik dan para pemegang saham akan mendapatkan keuntungan dikarenakan meningkatnya harga saham maupun *return* saham. 2) *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh terhadap *return* saham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap perubahan DER yang bisa diketahui melalui analisis kinerja keuangan tidak berpengaruh penting terhadap perubahan tinggi rendahnya harga saham, sehingga tidak mempengaruhi pergerakan *return* saham. 3) *Earning Per Share* (EPS) berpengaruh positif terhadap *return* saham. Hasil ini menunjukkan bahwa EPS yang semakin besar akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak semakin meningkat, dengan meningkatnya laba bersih setelah pajak yang dihasilkan oleh perusahaan maka *return* yang diterima oleh para pemegang saham juga semakin meningkat.

Berdasarkan simpulan dan hasil penelitian di atas, maka saran yang diberikan sehubungan dengan penelitian ini adalah : 1) Bagi perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia disarankan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan untuk menarik minat investor berinvestasi di perusahaan tersebut. 2) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan memperluas penelitian dengan menambah sampel penelitian dari seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan periode pengamatan yang lebih panjang sehingga hasil yang diperoleh akan lebih dapat digeneralisasi dan akan lebih menggambarkan kondisi sesungguhnya perusahaan. 3) Bagi peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk menggunakan variabel lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini, untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan berinvestasi di Bursa Efek Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

Aziz, Nini Safitri. 2012. Pengaruh Return On Asset (ROA), Debt To Equity Ratio (DER), Tingkat Suku Bunga dan Tingkat Inflasi terhadap Return Saham Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia Periode 2003-2010. *Skripsi*. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar.

Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id)

Darajat, Zakiah. 2018. Pengaruh ROA, EPS, dan DER terhadap Return Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

- Periode 2012-2016). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakruddin. 2012. *Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2015. *Analisis Investasi di Aset Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hartono, Jogiyanto. 2012. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta : BPF.
- Hartono, Jogiyanto. 2015. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi Kesepuluh. Yogyakarta : BPF.
- Hermawan, Wildan Arif. 2016. Analisis Pengaruh Faktor Fundamental terhadap Return Saham pada Perusahaan Properti dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi*. Program Studi Manajemen Universitas Negeri Yogyakarta.
- Husnan, Suad. 2015. *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Edisi 5. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Indonesia. *Undang-Undang Pasar Modal*. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995. LN No.64 Tahun 1995, TLN No. 3608.
- Karyada, I. P. F., & Irwanto, A. 2017. Kualitas informasi akuntansi pada tahap konvergensi International Financial Reporting Standard. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 308-318.
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Laksono, Cahyo Dwi. 2017. Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi*. Program Studi Manajemen Universitas Negeri Yogyakarta.
- Muhammad, T.fazil. 2018. Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental terhadap Return Saham pada Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Novianti, Kurnia. 2018. Analisis Pengaruh Economic Values Added, Return On Assets, dan Earnings Per Share terhadap Return Saham Perusahaan Indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi*. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahmadhini, Anis. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2017. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta, CV.

Tandelilin, Eduardus. 2010. *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Edisi 1. Kanisius IKAPI Yogyakarta.

Verawati, Rika. 2014. Faktor-Faktor Penentu yang Mempengaruhi Return Saham Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2008-2013. Skripsi. Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta.

PENGARUH PROFESIONAL AUDITOR DAN ORIENTASI ETIKA TERHADAP *WHISTLEBLOWING* DENGAN SENSITIVITAS ETIS SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Sofyan Syamsuddin¹, Goso², Sahrir³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Palopo, E-mail: sofyansyam@umpalopo.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of auditor professionalism, ethical orientation, idealism and ethical orientation of relativism towards *whistleblowing* with ethical sensitivity as a moderating variable. This research is a quantitative study using a descriptive approach. The population in this research are all auditors who work at the Republic of Indonesia Supreme Audit Board. The sampling technique used in this study uses convenience sampling. The sample criteria in this study is that the respondent concerned had at least one audit task, as for the sample in this study amounted to 102 auditors. The data used in this study are primary data collected through a questionnaire survey in physical form and google form. Data analysis using multiple linear regression with the absolute difference value approach. The results of the study with multiple linear regression analysis showed that auditor profesionalisme and ethical orientation in relativism influenced *whistleblowing*, while the ethical orientation of idealism does not affect *whistleblowing*. Moderating analysis shows that ethical sensitivity is not able to moderate auditor professionalism, ethical orientation, relativism towards *whistleblowing*.

Keywords: Professional auditor; ethical orientation; ethical sensitivity; *whistleblowing*.

PENDAHULUAN

Whistleblowing menjadi perhatian dunia dikarenakan telah banyak perusahaan-perusahaan besar melakukan kecurangan dan pada akhirnya perusahaan tersebut tertangkap karena kasus kecurangan yang dilakukan. *Whistleblowing* merupakan pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan melanggar hukum, tidak etis/atau bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi atau pemangku kepentingan. Sedangkan orang yang melaksanakan *whistleblowing* dikatakan sebagai pengungkap kecurangan atau *whistleblower* (Bertens, 2000). Sejumlah perusahaan terkemuka melakukan skandal keuangan yang mengakibatkan profesi auditor sebagai sorotan berbagai pihak. Seorang auditor memegang peran serta dalam berbagai kasus terkait kebangkrutan perusahaan. Profesionalisme auditor seakan dijadikan kambing hitam yang layak memikul tanggung

jawab kepada pihak lain yang sebenarnya mempertanggung jawabkan atas kesalahan tersebut.

Dalam satu dekade terakhir skandal akuntansi pada perusahaan Enron dan Worldcom telah menyanggah berbagai pertanyaan terkait fungsi dari profesi akuntansi. Profesi akuntan dalam kasus-kasus tersebut menjadi salah satu kunci persoalan, dimana Perusahaan Enron membuat laporan keuangan dengan memanipulasi angka-angka laporan (*window dressing*) agar nampak kinerja perusahaan baik. *Window dressing* dilakukan dengan *me-mark up* pendapatan dan penutup hutang dengan teknik *off-balance sheet*. Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu Arthur Andersen disalahkan karena berkontribusi merekayasa laporan keuangan Enron selama bertahun-tahun. Inilah yang membuat seseorang pihak Enron tidak dapat menahan melihat kecurangan dan melaporkannya. (Rianti, Nasir, & Hariyani, 2017)

Dalam melindungi kualitas kinerja auditor serta hasil auditnya tidak terjadi kecurangan pada laporan keuangan, dalam menjalankan pekerjaannya seorang auditor harus profesional. Agar mampu meningkatkan sikap profesionalnya dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, seorang akuntan publik hendaknya mempunyai pengetahuan audit dan tidak serta-merta bekerja demi kepentingan kliennya, melainkan pihak lain yang juga mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan. Untuk dapat melindungi kepercayaan klien, akuntan publik dituntut untuk mempunyai keahlian yang memadai.

Profesional auditor mengajak manusia berperilaku lebih dari tuntutan standar atau keadilan dalam menyikapi problema sosial dan memanfaatkan kesalahan orang lain. Bahkan manusia mampu melakukan lebih dari hak orang lain yang semuanya mengunjukkan kebaikan. manusia dengan mengajak untuk berperilaku baik dengan orang lain di atas standar keadilan. Oleh sebab itu, auditor menginginkan untuk mendidik profesi keanggotaannya dan terhindar dari perilaku pelanggaran etika. Seorang auditor dengan komitmen profesional yang tinggi diharapkan lebih sensitif terhadap situasi dan kondisi etika serta auditor yang berkomitmen organisasi lebih tinggi akan lebih sensitif dalam persoalan etika. Dengan demikian, karyawan memiliki komitmen organisasi yang tinggi, sensitivitas etika yang tinggi akan lebih tercermin pada perilaku etikanya (mempedomani etika profesinya). Dengan demikian sebagai seorang auditor ataupun akuntan, patut memiliki keberanian yang besar untuk mengungkapkan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi dengan berbagai resiko.

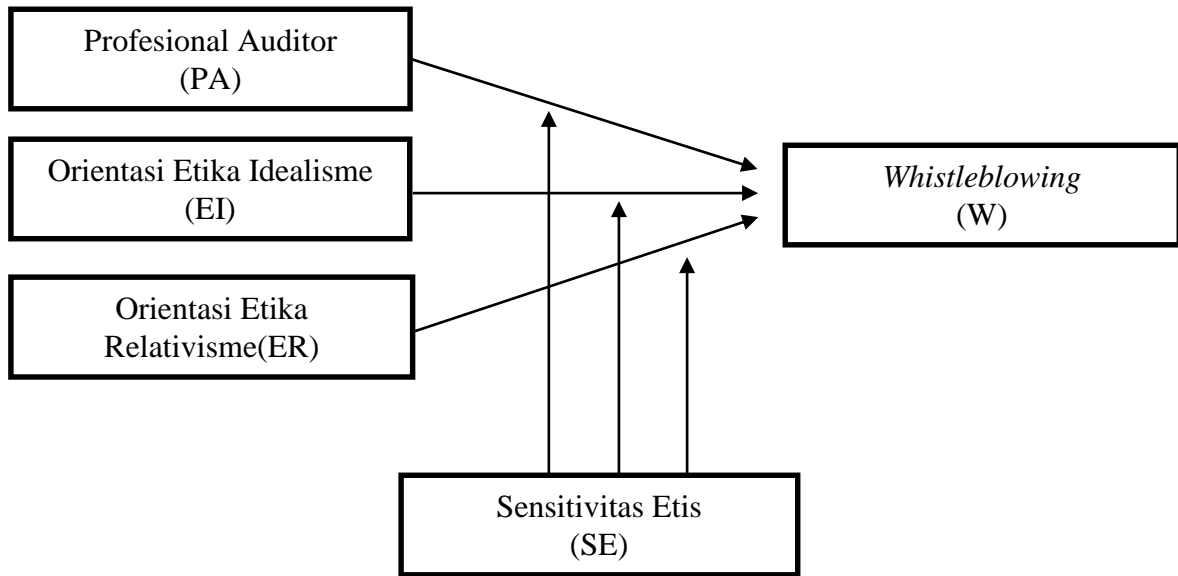
Orientasi etika merupakan tujuan utama perilaku profesional yang berkaitan erat dengan moral dan nilai-nilai yang berlaku serta digerakkan oleh dua karakteristik etika idealisme dan relativisme. Idealisme berhubungan dengan tingkat dimana individual percaya bahwa konsekuensi yang diinginkan (konsekuensi positif) tanpa melanggar kaidah moral. (Janitra, 2017). Orientasi etika dari seorang auditor mempengaruhi keinginan melakukan *whistleblowing*. Idealisme auditor yang tinggi akan rendah kemungkinan mereka melakukan *whistleblowing*.

Kecenderungan manusia mencari keuntungan material dan menumpuk kekayaan lainnya membuat manusia lupa kepada etika, moral, dan kepentingan umum. Menilai bahwa walaupun sejumlah profesi akuntansi memiliki etika profesi, namun etika itu dibangun atas dasar rasionalisme ekonomi belaka, sehingga wajar saja ketika etika tersebut manusia tidak dapat terhindar dari pelanggaran moral dan etika untuk mengejar keuntungan material semata. Sensitivitas etika (*ethical sensitivity*) yaitu kemampuan untuk mengetahui masalah-masalah etis yang terjadi (Shaub, 1989) di kutip dari (Janitra, 2017). Oleh sebab itu, seorang auditor yang sensitif terkait masalah etika akan lebih profesional. Dalam hal pertimbangan etika agar mampu melatih sensitivitasnya, auditor harus mampu menyadari adanya masalah etika dalam pekerjaannya dan sensitivitas tersebut merupakan tahap pertama dalam proses pengambilan keputusan etika.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh auditor yang bekerja pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *convenience sampling*. Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu responden yang bersangkutan minimal telah melakukan satu kali tugas audit, adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 102 auditor. Data yang digunakan yaitu data primer yang dikumpulkan melalui survai kuesioner dalam bentuk fisik dan *google form*. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Metode pengumpulan data diperoleh dari tanggapan responden atas pertanyaan/pernyataan yang ada di dalam kuesioner dan setiap responden diminta pendapatnya mengenai pertanyaan/pernyataan yang ada. Setelah kuesioner selesai di isi oleh responden, kuesioner tersebut dikumpulkan kemudian diuji kebenarannya menggunakan program IMB SPSS 23 *for windows*. Berikut adalah gambaran desain penelitian yang menggambarkan hubungan variabel independen yaitu Profesional Auditor (PA), Orientasi Etika Idealisme (EI) dan Orientasi Etika Relativisme (ER) pada

variabel dependen yaitu *Whistleblowing* (W) dengan variabel Moderating yaitu Sensitivitas Etis (SE).



Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data statistik deskriptif, uji kualitas data berupa uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji hipotesis berupa uji regresi linear berganda menggunakan nilai selisih mutlak yang terdiri dari analisis koefisien determinasi, uji regresi secara simultan dan uji signifikansi parameter individual dengan bantuan komputer melalui program IBM SPSS 23 *for windows*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel penelitian yaitu profesional auditor, orientasi etika idealisme, orientasi etika relativisme, sensitivitas etis dan *whistleblowing* disajikan dalam tabel *descriptive statistics* yang menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean* dan standar deviasi yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profesional Auditor	102	12	25	18.58	2.830
Orientasi Etika Idealisme	102	14	25	20.69	2.610

Orientasi Etika Relativisme	102	5	25	16.60	3.569
Sensitivitas Etis	102	8	20	13.27	1.981
<i>Whistleblowing</i>	102	12	25	16.58	2.103
Valid N (listwise)	102				

Sumber: Data primer diolah, 2019

Pada tabel di atas menggambarkan hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif dengan jumlah data pada setiap variabel yaitu 102 yang berasal dari sampel auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai mean tertinggi berada pada variabel orientasi etika idealisme sebesar 20,69, sedangkan yang terendah adalah variabel sensitivitas etis sebesar 13,27. Untuk standar deviasi tertinggi berada pada variabel orientasi etika relativisme sebesar 3,569, sedangkan yang terendah adalah variabel sensitivitas etis sebesar 1,981.

Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu koesionar yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk dalam penelitian ini dengan menggunakan uji statistik Cronbach's Alpha. Hasil uji reliabilitas kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Profesional Auditor	0,835	Reliabel
Orientasi Etika Idealisme	0,873	Reliabel
Orientasi Etika Relativisme	0,854	Reliabel
Sensitivitas Etis	0,504	Reliabel
<i>Whistleblowing</i>	0,357	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2019

Pada tabel di atas nilai Cronbach's Alpha untuk semua variabel menunjukkan angka di atas lebih besar dari 0,1946 yang mengartikan semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, yakni 0,835 untuk profesional auditor; 0,873 orientasi etika idealisme; 0,854 orientasi etika relativisme; 0,504 sensitivitas etis; 0,357 *whistleblowing*.

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogrov-Sminov*. Data dari pengujian dikatakan terdistribusi normal apabila menunjukkan nilai

signifikan di atas 5% atau 0,05. Data hasil dari uji normalitas variabel penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual	Unstandardized Predicted Value	Unstandardiz ed Residual
N		102	102	102
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	16.5784314	.0000000
	Std. Deviation	1.85570810	.99036767	1.85570810
Most Differences	ExtremeAbsolute	.045	.135	.045
	Positive	.045	.135	.045
	Negative	-.041	-.076	-.041
Test Statistic		.045	.135	.045
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.000 ^c	.200 ^{c,d}

Sumber: Data primer diolah, 2019

Pada tabel di atas menunjukkan hasil pengujian Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,2. Nilai residual tersebut memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang ada di penelitian ini telah terdistribusi secara normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), dengan dasar keputusan jika nilai tolerance di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10 maka tidak terjadi masalah multikolinearitas variabel independen dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Profesional Auditor	0,671	1,490	Tidak terjadi Multikolinearitas
Orientasi Etika Idealisme	0,749	1,335	Tidak terjadi Multikolinearitas
Orientasi Etika Relativisme	0,811	1,233	Tidak terjadi Multikolinearitas
Sensitivitas Etis	0,801	1,248	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah, 2019

Pada tabel di atas menunjukkan hasil uji multikolinearitas bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas pada model

regresi yang digunakan. Sama artinya bahwa tidak terdapat kolerasi antar variabel independen.

Hasil Uji Autokorelasi

Untuk melihat ada tidaknya gejala autokorelasi dapat dilihat dari besarnya angka *Durbin-Watson* (DW) yang dihasilkan. Kriteria pengujian untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi adalah: (1) angka DW di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif, (2) angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi, (3) angka DW di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif (Ghozali, 2013). Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

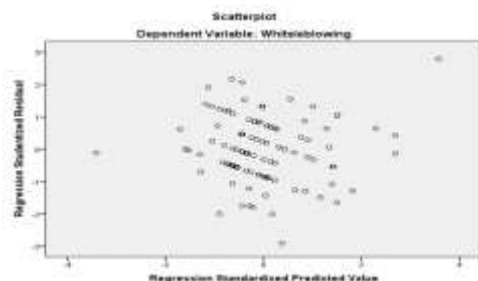
Variabel	DL	DU	DW	4-DU	4-DL	Keterangan
Model Summary	1,5969	1,7596	1,566	2,2404	2,4031	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data primer diolah, 2019

Pada tabel di atas, nilai *Durbin-Watson* (DW) adalah diantara -2 sampai +2, maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi antar nilai residual

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *Sactter Plot*. Apabila tidak terdapat pola yang teratur, maka model regresi tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan metode *Scatter Plot* dapat dilihat gambar berikut ini:



Gambar 1. Scatterplot

Pada gambar di atas grafik *Scatter Plot* menunjukkan bahwa data tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak terdapat adanya pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga

model regresi layak digunakan untuk memprediksi whistleblowing berdasarkan professional auditor, orientasi etika idealisme, orientasi etika relativisme, dan sensitivitas etis.

Analisis Regresi Berganda

Uji Regresi Linear Berganda H1, H2, dan H3

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2013) menyatakan bahwa koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.388 ^a	.151	.125	1.96811

Sumber: Data primer diolah, 2019

Pada tabel di atas menunjukkan hasil bahwa Adjusted R^2 adalah 0,151. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan yang dapat diterangkan oleh variabel dependen terhadap variabel independen dalam model persamaan ini adalah sebesar 15,1% sedangkan sisanya 84,9% diterangkan oleh faktor lain di luar dalam model regresi. Jika nilai R^2 semakin mendekati 1 maka variabel independen (Profesional Auditor, Orientasi Etika Idealisme, Orientasi Etika Relativisme) semakin kuat pengaruhnya dalam menjelaskan variabel dependen *Whistleblowing*.

Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	67.275	3	22.425	5.789	.001 ^b
Residual	379.598	98	3.873		
Total	446.873	101			

Sumber: Data primer diolah, 2019

Pada tabel di atas menunjukkan hasil F hitung sebesar 5,789 dengan angka signifikan 0,01. Nilai signifikan kurang dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa model penelitian ini adalah fit atau dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yaitu profesional auditor, orientasi etika idealisme, orientasi etika relativisme, dan sensitivitas etis mempunyai pengaruh simultan terhadap *whistleblowing*. Sehingga dapat diartikan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen dengan kriteria berdasarkan nilai signifikansi <0,05. Jika nilai signifikan <0,05 maka variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya, jika nilai signifikansi >0,05 maka variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghazali,2013). Hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.902	1.715		6.940	.000
Profesional Auditor	.178	.082	.239	2.163	.033
Orientasi Etika Idealisme	-.058	.086	-.072	-.672	.503
Orientasi Etika Relativisme	.155	.059	.263	2.608	.011

Sumber: Data primer diolah, 2019

Pada tabel di atas, dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$W = 11,902 + 0,178PA - 0,058EI + 0,155ER + e.....(1)$$

Nilai konstan (a) sebesar 11,902 yang berarti jika variabel profesional auditor, orientasi etika idealisme, dan orientasi etika relativisme dinyatakan konstan pada angka nol, maka *whistleblowing* sebesar 11,902.

Koefisien regresi variabel profesional auditor sebesar 0,178. Koefisien regresi yang bernilai positif ini memiliki arti bahwa jika profesional auditor meningkat sebesar satu satuan, maka *whistleblowing* meningkat sebesar 0,178 satuan dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol.

Koefisien regresi variabel orientasi etika idealisme sebesar -0,058. Koefisien regresi yang bernilai negatif ini memiliki arti jika orientasi etika idealisme menurun satu satuan, maka *whistleblowing* juga akan menurun sebesar 0,058 satuan dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol.

Koefisien regresi variabel orientasi etika relativisme sebesar 0,155. Koefisien regresi yang bernilai positif ini memiliki arti bahwa jika orientasi etika relativisme meningkat sebesar satu satuan, maka *whistleblowing* maningkat sebesar 0,155 satuan dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol.

Uji Regresi Moderasi H1, H2, dan H3 menggunakan Selisih Mutlak

Uji H4, H5, dan H6 dilakukan dengan uji regresi moderasi menggunakan nilai selisih mutlak yaitu pengaruh professional auditor, orientasi etika idealisme, dan orientasi etika relativisme terhadap *whistleblowing* dengan sensitivitas etis sebagai variabel moderating. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Moderasi

Variabel Independen	Variabel Dependen			Jenis Moderasi	
	<i>Whistleblowing</i>				
Panel Model Penelitian	Coefficient	t statistic	Sig	Keterangan	
(Constan)	16,848	47,035	0,000		
PA	0,365	1,563	0,121	H1 ditolak	
EI	-0,132	-0,588	0,558	H2 ditolak	
ER	0,431	2,043	0,044	H3 diterima	
SE	0,567	2,552	0,012		
PA-SE	-0,421	-1,348	0,181	H4 ditolak	Predictor Variabel
EI-SE	0,320	1,128	0,262	H5 ditolak	Predictor Variabel
ER-SE	-0,235	-0,776	0,440	H6 ditolak	Predictor Variabel
F test	4,427				
Sig	0,000				
R ²	0,248				
Adjusted R ²	0,192				

Sumber: Data primer diolah, 2019

Pada tabel di atas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$W = 16,848 + 0,365PA - 0,132EI + 0,431ER + 0,567SE - 0,427|PA-SE| + 0,320|EI-SE| - 0,235|ER-SE| + e.....(2)$$

Nilai konstanta (a) sebesar 16,848 memiliki arti bahwa jika nilai variabel profesional auditor, orientasi etika idealisme, orientasi etika relativisme, dan sensitivitas etis konstan pada angka nol, maka nilai *whistleblowing* sebesar 16,848.

Nilai koefisien moderat antara variabel profesional auditor dengan sensitivitas etis sebesar -0,421. Tanda negatif ini memiliki arti jika interaksi profesional auditor dengan sensitivitas etis meningkat, maka *whistleblowing* akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika interaksi profesional auditor dengan sensitivitas etis menurun, maka *whistleblowing* akan menurun.

Nilai koefisien moderat antara variabel orientasi etika idealisme dengan sensitivitas etis sebesar 0,320. Tanda positif ini memiliki arti jika interaksi orientasi etika idealisme dengan sensitivitas etis meningkat, maka *whistleblowing* akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika interaksi orientasi etika idealisme dengan sensitivitas etis menurun, maka *whistleblowing* akan menurun.

Nilai koefisien moderat antara variabel orientasi etika relativisme dengan sensitivitas etis sebesar -0,235. Tanda negatif ini memiliki arti jika interaksi orientasi etika relativisme meningkat, maka *whistleblowing* akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika interaksi orientasi etika relativisme dengan sensitivitas etis menurun, maka *whistleblowing* akan menurun.

Pembahasan Hasil

Pengaruh Profesional Auditor terhadap Whistleblowing

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan t hitung sebesar 2,163 > t tabel 1,98447 dengan signifikansi sebesar 0,033 ($p < 0,05$). Hal ini berarti bahwa Profesional Auditor berpengaruh terhadap *Whistleblowing*. Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa H1 diterima, artinya Profesional Auditor berpengaruh terhadap *Whistleblowing*.

Profesional seorang auditor merupakan suatu tindakan loyalitas berdasarkan norma dan aturan yang berlaku secara umum dari pekerjaan yang sedang dijalani. Semakin marak tindakan kecurangan, profesionalisme auditor sangat diperlukan dalam mengungkap tindak kecurangan tersebut. Oleh karena internal auditor tidak hanya bekerja demi kepentingan perusahaan saja, akan tetapi hasil kinerjanya kepada masyarakat juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Tingkatan profesionalisme auditor menentukan intensitas dalam melakukan *whistleblowing*. Profesi diartikan sebagai keyakinan bahwa profesi yang

dilakukan memberikan suatu yang lebih baik bagi diri seseorang. Hal ini didasarkan pada pertimbangan seseorang atas apa yang dinilainya baik dan benar.

Seorang auditor perlu berkomitmen profesional karena dapat berdampak pada diri individu dan organisasi. Komitmen profesional seorang auditor yang semakin tinggi dalam menerima norma-norma dan nilai-nilai profesional maka semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk menganggap *whistleblowing* menjadi suatu hal yang penting serta semakin tinggi pula kemungkinan mereka melakukan *whistleblowing*.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Bakri, 2014), (Yulianto, 2015), (Zanaria, 2016), (Rianti et al., 2017), (Janitra, 2017) yang menemukan hasil bahwa Profesional Auditor berpengaruh terhadap *whistleblowing*.

Pengaruh Orientasi Etika Idealisme terhadap Whistleblowing

Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan t hitung sebesar $-0,672 < t \text{ tabel } 1,98447$ dengan signifikansi sebesar 0,503 ($p > 0,05$). Hal ini berarti bahwa Orientasi Etika Idealisme tidak memiliki pengaruh terhadap *Whistleblowing*. Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa H2 ditolak, artinya Orientasi Etika Idealisme tidak berpengaruh terhadap *Whistleblowing*.

Seorang auditor yang idealis kemungkinan justru tidak memperdulikan untuk melakukan *whistleblowing* karena bertindak sesuai dengan perasaan yang tidak rasional dengan realita pada perusahaan. Terkadang seorang auditor yang idealis akan dicegah untuk melakukan *whistleblowing* agar tidak mengganggu perhitungan-perhitungan rasional dalam sebuah perusahaan.

Menurut teori Adam Smith yang mengasumsikan bahwa sifat manusia adalah rasional ekonomis yang berasal dari falsafah hedonisme yang berpendapat bahwa orang bertindak untuk memenuhi kesenangan diri mereka semaksimal mungkin. Dan menurutnya orang yang bertindak dengan perasaan adalah tidak rasional dan oleh karena itu harus dicegah supaya tidak mengganggu perhitungan-perhitungan rasional seseorang mengenai kepentingan dirinya.

Asumsi ini juga dipertegas oleh Douglas McGregor (1960) yang dinamakan teori X yaitu (1) Sifat orang itu malas, dan oleh karena itu harus dimotivasi dengan perangsang dari luar, (2) Tujuan alamiah orang bertentangan dengan tujuan organisasi, oleh karena itu harus dikendalikan dengan kekuatan, (3) Karena perasaan-perasaan mereka tidak rasional, maka pada dasarnya orang tidak disiplin dan mengendalikan diri.

Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yulianto, 2015), (Janitra, 2017) yang menemukan hasil bahwa Orientasi Etika Relativime berpengaruh terhadap *whistleblowing*.

Pengaruh Orientasi Etika Relativisme terhadap Whistleblowing

Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan t hitung sebesar $2,608 < t$ tabel $1,98447$ dengan signifikansi sebesar $0,011$ ($p < 0,05$). Hal ini berarti bahwa Orientasi Etika Relativisme berpengaruh terhadap *Whistleblowing*. Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa H3 diterima, artinya Orientasi Etika Relativisme berpengaruh terhadap *Whistleblowing*.

Seorang auditor yang relativistis cenderung untuk menolak prinsip moral secara universal termasuk peran organisasi profesional sebagai pedoman untuk bertindak. Seorang auditor yang memiliki relativisme yang tinggi mempunyai tingkat memandang *whistleblowing* sebagai hal yang penting dan memiliki kecenderungan untuk melakukan *whistleblowing*.

Seorang auditor yang memiliki sebuah komitmen organisasi yang tinggi di dalam dirinya akan menimbulkan rasa memiliki organisasi yang tinggi pula, sehingga ia tidak akan merasa ragu untuk melakukan *whistleblowing* karena ia yakin tindakan yang dilakukannya tersebut akan melindungi organisasi dari kehancuran.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (DZ Nayir, 2012), (Brink, Cereola, & Menk, 2015), (Yulianto, 2015), (Janitra, 2017) yang menemukan hasil bahwa Orientasi Etika Relativisme berpengaruh terhadap *whistleblowing*.

Pengaruh Profesional Auditor terhadap Whistleblowing dengan Sensitivitas Etis sebagai variabel moderating

Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan t hitung sebesar $-1,348 < t$ tabel $1,66123$ dengan signifikansi sebesar $0,181$ ($p > 0,05$). Hal ini berarti bahwa Sensitivitas Etis merupakan predictor variabel Profesional Auditor terhadap *Whistleblowing*. Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa H4 ditolak, artinya Sensitivitas Etis tidak mampu memoderasi hubungan antara Profesional Auditor terhadap *Whistleblowing*.

Sensitivita etis diukur dengan indikator yaitu kegagalan akuntan dalam mengerjakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang diminta, dan subordinasi judgement akuntan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi.

Jones (1991) dalam (Wirakusuma, 2019) menyebutkan bahwa dalam penelitian akuntansi etik akuntan difokuskan dalam hal kemampuan pengambilan keputusan dan perilaku etis. Jika auditor tidak mengakui sifat dasar etika dalam keputusan, skema moralnya tidak akan mengarah pada masalah etika tersebut. Jadi kemampuan untuk mengakui sifat dasar etika dari sebuah keputusan merupakan sensitivitas etika.

Kemampuan seorang auditor profesional sangat dipengaruhi oleh sensitivitas individu tersebut. Faktor yang mempengaruhi sensitivitas etis adalah lingkungan budaya dan pengalaman pribadi yang membentuk orientasi etika. Lingkungan budaya serta pengalaman pribadi yang kurang baik akan mempengaruhi profesional seorang auditor yang mengakibatkan tidak inginnya melakukan *whistleblowing*.

Pengaruh Orientasi Etika Idealisme terhadap Whistleblowing dengan Sensitivitas Etis sebagai variabel moderating

Hasil pengujian hipotesis 5 menunjukkan t hitung sebesar $1,128 < t$ tabel $1,66123$ dengan signifikansi sebesar $0,262$ ($p > 0,05$). Hal ini berarti bahwa Sensitivitas Etis merupakan predictor variabel Orientasi Etika Idealisme terhadap *Whistleblowing*. Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa H5 ditolak, artinya Sensitivitas Etis tidak mampu memoderasi hubungan antara Orientasi Etika Idealisme terhadap *Whistleblowing*.

Orientasi etika idealisme dapat diukur dengan indikator sikap untuk tidak merugikan orang lain sekecil apapun, seorang individu tidak boleh melakukan tindakan yang dapat mengancam martabat dan kesejahteraan individu dan tindakan bermoral adalah tindakan yang hampir sesuai dengan tindakan yang sempurna. (Dzakirin, 2015)

Namun seorang auditor dengan idealisme yang rendah, mengakui bahwa adanya prinsip moral tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi negatif. Mereka merasakan bahwa beberapa kejahatan sering diperlukan untuk mencapai manfaat secara keseluruhan.

Seorang auditor yang idealis sangat dipengaruhi oleh sensitivitas individu tersebut. Faktor yang mempengaruhi sensitivitas etis adalah lingkungan budaya dan pengalaman pribadi yang membentuk orientasi etika. Lingkungan budaya serta pengalaman pribadi yang kurang baik akan mempengaruhi idealis seorang auditor yang mengakibatkan tidak inginnya melakukan *whistleblowing*.

Pengaruh Orientasi Etika Relativisme terhadap Whistleblowing dengan Sensitivitas Etis sebagai variabel moderating

Hasil pengujian hipotesis 6 menunjukkan t hitung sebesar $-0,776 < t \text{ tabel } 1,66123$ dengan signifikansi sebesar $0,440 (p > 0,05)$. Hal ini berarti bahwa Sensitivitas Etis merupakan predictor variabel Orientasi Etika Relativisme terhadap *Whistleblowing*. Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa H6 ditolak, artinya Sensitivitas Etis tidak mampu memoderasi hubungan antara Orientasi Etika Relativisme terhadap *Whistleblowing*.

Orientasi etika relativisme dapat diukur dengan indikator etika yang bervariasi dari satu situasi dan masyarakat ke situasi dan masyarakat lainnya, selain itu tipe-tipe moralitas yang berbeda tidak dapat dibandingkan dengan keadilan, pertimbangan etika dalam hubungan antar orang begitu kompleks, sehingga individu seharusnya diijinkan untuk membentuk kode etik individu mereka sendiri, serta kebohongan dapat dinilai sebagai tindakan moral atau imoral tergantung pada situasi. (Dzakirin, 2015)

Relativisme adalah model cara berpikir pragmatis, alasannya adalah bahwa aturan etika sifatnya tidak universal karena etika dilatarbelakangi oleh budaya, dimana masing-masing budaya memiliki aturan yang berbeda-beda. Relativisme etis merupakan teori bahwa suatu tindakan dapat dikatakan etis atau tidak, benar atau salah, tergantung kepada pandangan masyarakat itu.

Etika Relativisme seorang auditor cenderung akan menolak prinsip moral secara keseluruhan termasuk peran organisasi profesional sebagai pedoman untuk bertindak. Relativisme seorang auditor yang rendah akan memiliki tingkat memandang *whistleblowing* sebagai sesuatu yang tidak penting dan lebih menginginkan untuk tidak melakukan *whistleblowing*. Dapat digambarkan bahawa *whistleblowing* sebagai suatu proses yang mengaitkan faktor pribadi, semakin tinggi komitmen profesional maka akan semakin tinggi pula untuk beranggapan bahwa *whistleblowing* menjadi sebuah hal yang penting. Relativisme merupakan paradigma berpikir pragmatis, alasan utamanya adalah aturan etika bersifat tidak menyeluruh (*universal*) dikarenakan etika didasari oleh budaya masing-masing yang berbeda aturannya. Relativisme merupakan suatu pandangan bahwa tidak ada standar etis yang secara absolut benar.

Relativisme seorang auditor sangat dipengaruhi oleh sensitivitas individu tersebut. Faktor yang mempengaruhi sensitivitas etis adalah lingkungan budaya dan pengalaman pribadi yang membentuk orientasi etika. Lingkungan budaya serta pengalaman pribadi yang kurang baik akan mempengaruhi relativisme seorang auditor untuk melakukan *whistleblowing*.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu (1) Profesional auditor berpengaruh terhadap *whistleblowing* seorang auditor yang ada pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sehingga H1 diterima. (2) Orientasi etika idealisme tidak berpengaruh terhadap *whistleblowing* seorang auditor yang ada pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sehingga H2 ditolak. (3) Orientasi etika relativisme berpengaruh terhadap *whistleblowing* seorang auditor yang ada pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sehingga H3 diterima. (4) Sensitivitas etis tidak mampu memoderasi hubungan antara profesional auditor terhadap *whistleblowing* yang ada pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sehingga H4 ditolak. (5) Sensitivitas etis tidak mampu memoderasi hubungan antara orientasi etika idealisme terhadap *whistleblowing* yang ada pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sehingga H5 ditolak. (6) Sensitivitas etis tidak mampu memoderasi hubungan antara orientasi etika relativisme terhadap *whistleblowing* yang ada pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sehingga H6 ditolak.

Saran dari penelitian ini yaitu (1) Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel moderating untuk mengukur apakah memperkuat atau memperlemah variabel Independen ke Devenden. (2) Sampel yang digunakan dalam penelitian selanjutnya disarankan menggunakan tehnik *purposive sampling*, sehingga dapat jelas ditentukan sampel yang sesuai. (3) Pengambilan sampel disarankan tersalurkan secara merata diseruluh pada AKN I sampai VII, baik dengan cara menggunakan kuesioner fisik maupun link *google form*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakri. (2014). Analisis Komitmen Profesional dan Sosialisasi Antisipatif Serta Bubungannya Dengan Whistleblowing. *Jurnal Al-Mizan*, 10(1), 152–167.
- Bertens, K. (2000). *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Brink, A. G., Cereola, S. J., & Menk, K. B. (2015). The Effects of Personality Traits , Ethical Position , and the Materiality of Fraudulent Reporting on Entry-level Employee Whistleblowing Decisions. *Journal of Forensic & Investigative Accounting*, 7(1), 180–211.
- DZ Nayir. (2012). Value orientations as determinants of preference for extemal and anonymous whistleblowing. *Journal of Business Ethics*. *Journal of Business Ethics*, 107(2), 197–213.

- Dzakirin, M. K. (2015). Kharul. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 53(9), 1689–1699. Retrieved from <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf><https://hdl.handle.net/20.500.12380/245180><http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003><https://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12>
- Janitra. (2017). Pengaruh Orientasi Etika, Komitmen Profesional, Komitmen Organisasi, dan Sensitivitas Etis Terhadap Internal Whistleblowing (Studi Empiris Pada SKPD Kota Pekanbaru). *JOM Fekon*, 4(1), 1208–1222.
- Rianti, D., Nasir, A., & Hariyani, E. (2017). Pengaruh Komitmen Profesional Auditor Terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing Dengan Retaliasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada BRI Provinsi Riau). *JUM Fekon*, 4(1), 1531–1543.
- Wirakusuma, M. G. (2019). Pengalaman Memoderasi Pengaruh Idealisme dan Komitmen pada Keputusan Etis Konsultan Pajak di Wilayah Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 14(1), 10–18. <https://doi.org/10.24843/jiab.2019.v14.i01.p02>
- Yulianto, R. D. A. (2015). Pengaruh Orientasi Etika, Komitmen Profesional, dan Sensitivitas Etis Terhadap Whistleblowing (Universitas Negeri Yogyakarta; Vol. 1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Zanaria, Y. (2016). Pengaruh Profesionalisme Audit, Intensitas Moral untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1), 105–116. Retrieved from <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.95.g70>

Fintech Dari Perspektif Perilaku User Dalam Penggunaan E-Wallet Dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM).

(Studi Kasus Pada Pengguna E-Wallet di Denpasar)

Gusi Putu Lestara Permana⁽¹⁾

Hesty Pahlevy Setyo Rini⁽²⁾

I Gusti Ngurah Darma Paramartha⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Surel: lestarapermana@undiknas.ac.id;

ABSTRACT

This study based on by interest researchers related to the development in the transaction-based fintech is an e-wallet which is the number of users of e-wallets that has increased very rapidly nowadays. The number of e-wallet uses is increasing, so the usefulness, ease of use, risk, and also the enjoyment felt by each user also varies. The purpose of this study was to determine the effect of perceived usefulness, ease of use, risk, and enjoyment of behavioral intentions in e-wallet users in Denpasar. Used data in this study is the primary data, the researchers gain from the results of the spread of the questionnaire to the respondents in Denpasar. Sampling from this study using purposive sampling. The criteria used are active users of the e-wallet application and never transact at least once using an e-wallet application. This research using 75 respondents and using an analysis of multiple regressing use SPSS software version of 25. The results of the research show that the perceived usefulness, risk, and enjoyment influential positive towards the behavior of the user, while the perceived ease of use of a negative effect on the behavior of the user.

Keywords: Perceived Usefulness; Perceived Ease of Use; Perceived Risk; Perceived Enjoyment; and Behavioral Intention to Use.

PENDAHULUAN

Berkembangnya tingkat kecanggihan teknologi mampu mengubah pola hidup masyarakat termasuk sistem pembayaran dalam bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi tersebut berdampak pada system pembayaran berbasis teknologi yang pelan tapi pasti akan menggeser peran uang kartal kedalam bentuk digital lebih mudah, efisien, efektif, dan tentunya aman. Perkembangan teknologi sejalan dengan perubahan kehidupan manusia di masa digital yang mana teknologi menjadi bagian dari pada hidup manusia, penggunaan teknologi membantu manusia terkait dengan kecepatan dalam pemecahan masalah termasuk didalamnya kecepatan dalam hal keuangan, sehingga muncullah sebuah teknologi yaitu *financial technology (fintech)* ini. Perkembangan *financial*

technology (fintech) ini didasari oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam kehidupan yang ingin serba modern dan juga praktis. Pembayaran berbasis digital saat ini mulai tumbuh dan diminati disbanding dengan sistem manual dikarenakan kemudahan dalam proses pembayaran. Dengan adanya aplikasi-aplikasi dompet digital (*e-wallet*), masyarakat tidak perlu repot-repot untuk melakukan tarik tunai di ATM serta membawa banyak uang *cash* saat hendak bepergian karena hanya dengan *e-wallet* sudah sangat membantu sebagai tempat menyimpan uang.

Fintech adalah salah satu teknologi yang menggunakan jaringan internet dalam operasionalnya, teknologi ini pertamakali ditemukan pada tahun 1966 yang bertujuan untuk menghilangkan batasan-batasan dalam berbisnis. Perkembangan *fintech* semakin maju tatkala perbankan mulai mengimplementasikan, teknologi ini untuk mempermudah operasionalnya pada tahun 1980, kemudian dilanjutkan pada tahun 1990 ketika dukungan internet semakin meningkat maka penggunaan *fintech* juga ikut meningkat, contohnya penggunaan *online banking* atau *internet banking* (Kurniawan,2019). Indonesia sendiri telah mengatur tentang *fintech* dengan diterbitkannya surat edaran No. 18/22/DKSP mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjelaskan Bahwasanya layanan *fintech* adalah kegiatan layanan jasa dalam sistem pembayaran melalui teknologi *mobile* ataupun *web* yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka keuangan inklusif (Indonesia, 2016). Salah satu *fintech* adalah *e-wallet*.

Menurut (Di et al., 2020) mengenai *e-wallet* atau dompet elektronik adalah sebuah aplikasi *mobile* yang berguna sebagai penyimpanan uang elektronik yang dipergunakan untuk melakukan suatu transaksi pembayaran. Menurut Yudha (2019) *e-wallet* ini hadir disertai sistem yang sudah langsung terkoneksi dengan internet sehingga para konsumen dapat dengan mudah dalam menggunakannya sistem informasi tersebut. Apabila dibandingkan dengan *e-money* yang sistemnya menggunakan *chip*, *e-wallet* atau dompet digital ini dalam penggunaannya menggunakan aplikasi. Dengan demikian, suatu transaksi pembayaran yang dilakukan oleh penggunanya akan menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien karena saat melakukan transaksi pembayaran tidak perlu lagi melalui mesin ATM ataupun *mobile banking*.

Data dari Bank Indonesia menyebutkan bahwa secara resmi sebanyak 38 *e-wallet* telah resmi mendapatkan lisensi. Sebuah situs *meta-search* yaitu iPrice Group (2019) dan perusahaan analisis data terpercaya yaitu App Annie untuk mensurvey mengenai aplikasi *e-*

wallet yang paling mendominasi dan populer di Indonesia. Menurut survey tersebut pada quarter ke-2 tahun 2019 terdapat sebanyak lima aplikasi *e-wallet* populer di *google play* dan *ios* yang didasarkan pada jumlah pengguna aktif, dan yang lebih menarik menurut Jakpat *Mobile Survey Platform* dan *DailySocial* sebanyak 74,6% dari pengguna 5 aplikasi populer ini rata-rata berusia 20 sampai dengan 35 tahun yang berarti merupakan rata-rata usia generasi *millennial* saat ini.

Peningkatan pengguna dompet digital (*e-wallet*) mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, peningkatan tersebut adanya dorongan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan ceruk berupa kolaborasi pada layanan perbankan. Dengan semakin bertambahnya jumlah penggunaan *e-wallet* ini, maka manfaat, kemudahan dalam penggunaan, risiko, dan juga kenyamanan yang dirasakan dari masing-masing pengguna juga berbeda-beda. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk menguji pengaruh variabel-variabel dilihat dari perspektif perilaku pengguna dalam penggunaan dompet digital (*e-wallet*) dengan menggunakan faktor-faktor seperti persepsi manfaat (*perceived usefulness*), persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), persepsi risiko (*perceived risk*), dan juga menambahkan variabel persepsi kenyamanan (*perceived enjoyment*) terhadap perilaku pengguna (*behavioral intention to use*) pada pengguna *e-wallet* di Kota Denpasar.

Dari pemaparan konteks diatas arah dari penelitian ini untuk memahami bagaimana perilaku pengguna *e-wallet* di Kota Denpasar dengan menggunakan model penerimaan teknologi atau *technology acceptance model* (TAM)

Menurut F. D. Davis (1989) mengenai *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah suatu model yang digunakan dalam menguraikan bagaimana *user* dapat menerima suatu sistem. Tujuan utama dalam *Technology Acceptance Model* (TAM) yaitu untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana penentuan penerimaan suatu sistem teknologi informasi secara umum, serta memberikan penjelasan mengenai bagaimana perilaku pengguna dalam suatu populasi terhadap sistem teknologi informasi. Model ini mengemukakan saat pengguna dihadapkan pada sistem informasi atau teknologi yang baru, maka akan muncul beberapa aspek yang mempengaruhi sikap pengguna terhadap penggunaannya, terutama pada manfaat (*usefulness*) yaitu dimana pengguna percaya bahwa dengan menggunakan sistem teknologi informasi tersebut kinerja dari pengguna tersebut akan mengalami peningkatan, dan juga pada kemudahan penggunaan (*ease of use*) yaitu dimana pengguna

percaya bahwa dengan menggunakan sistem teknologi informasi tersebut pengguna tidak akan merasa kesulitan dikarenakan adanya kemudahan dalam penggunaannya sehingga tidak merepotkan penggunanya. TAM dapat menilai bagaimana penggunaan dan penerimaan suatu sistem informasi atau teknologi dari persepsi manfaat (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), begitupun dengan perilaku (*behavioral intention*) (Kurniawan, 2019). *Behavioral intention to use* adalah suatu kepercayaan yang dinilai berdasarkan tingkatan yang menunjukkan pada minat seseorang dalam melakukan suatu perilaku tertentu yang mana minat ini akan dilakukan tanpa adanya paksaan (Davis, 1989).

Davis tahun 1989 mengemukakan bahwa persepsi manfaat (*perceived usefulness*) merupakan salah satu konstruk utama yang membangun model TAM ini, konstruk ini merupakan konstruk yang menilai seberapa percaya seseorang mampu meningkatkan kinerjanya ketika menggunakan sebuah sistem, yang berarti kinerja pengguna suatu sistem akan meningkat apabila mereka percaya bahwa sistem ini berguna. Persepsi manfaat (*perceived usefulness*) ini diartikan sebagai suatu tingkatan individu yang percaya atau meyakini bahwa penggunaan suatu sistem tertentu mampu menaikkan tingkat kinerja orang tersebut, yang artinya manfaat dari adanya penggunaan teknologi informasi yang baru ini dapat meningkatkan kinerja maupun prestasi kerja seseorang yang menggunakannya (Davis, 1989). Penelitian yang dilakukan oleh Syahril & Rikumahu (2019) diperoleh hasil bahwa persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pengguna. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Sienatra (2020) juga menunjukkan bahwa persepsi manfaat berpengaruh signifikan terhadap *fintech continuance intention*. Peneliti Kurniawan (2019) juga melakukan penelitian dimana hasil yang diperoleh yaitu persepsi manfaat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat perilaku.

H1: Persepsi manfaat (*perceived usefulness*) berpengaruh positif terhadap perilaku pengguna (*behavioral intention to use*) pada pengguna *e-wallet* di Denpasar.

Konstruk kedua dalam model TAM adalah persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), konstruk ini merupakan konstruk yang menilai bahwa seseorang percaya apabila dalam menggunakan suatu sistem informasi maka mereka akan terbebas dari suatu usaha. Apabila suatu sistem informasi bisa dioperasikan dengan mudah maka pengguna akan menerima dan menggunakan kembali. Namun, berbeda saat suatu sistem

teknologi informasi tersebut sangat susah digunakan dan diaplikasikan maka pengguna sudah pasti akan merasa tidak nyaman dan tidak sangat mungkin tidak akan menggunakan kembali (Davis, 1989). Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2019) ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat perilaku. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Suyanto (2019) juga menunjukkan pengaruh positif persepsi kemudahan penggunaan terhadap *fintech*. Peneliti Syahril & Rikumahu (2019) juga melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pengguna.

H2: Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) berpengaruh positif terhadap perilaku pengguna (*behavioral intention to use*) pada pengguna *e-wallet* di Denpasar.

Menurut Oentario (2017) persepsi risiko (*perceived risk*) ini merupakan suatu tingkatan yang diprediksi konsumen mengenai bagaimana ketidakpastian dari adanya transaksi pembayaran secara *online*. Ketika pengguna menggunakan suatu sistem teknologi informasi adanya risiko yang akan pengguna terima saat menggunakannya. Pengguna sendiri sudah dapat memprediksi risiko apa saja yang mereka dapatkan ketika menggunakan sistem teknologi informasi tersebut. Persepsi risiko (*perceived risk*) ini diartikan sebagai suatu tingkatan yang diprediksi konsumen mengenai bagaimana ketidakpastian dari adanya transaksi pembayaran secara *online* (Oentario, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Syahril & Rikumahu (2019) ini menunjukkan bahwa persepsi risiko memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat pengguna. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hu, Zhongqing (2019) menunjukkan bahwa persepsi risiko akhirnya dapat berpengaruh terhadap perilaku pengguna layanan *fintech*. Penelitian yang dilakukan oleh Sienatra (2020) juga menunjukkan bahwa persepsi risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap *fintech continuance intention*.

H3: Persepsi risiko (*perceived risk*) berpengaruh positif terhadap perilaku pengguna (*behavioral intention to use*) pada pengguna *e-wallet* di Denpasar.

Menurut Ulaan et al., mengenai persepsi kenyamanan (*perceived enjoyment*) ini adalah suatu tingkat kepuasan yang pengguna rasakan saat melakukan pembelian secara *online* pada suatu *website* tertentu walaupun hanya sebatas membuat perasaan seseorang merasa bahagia dan belum termasuk dengan hasil yang pengguna dapatkan dari pengalaman

berbelanja *online* tersebut. Saat pengguna merasakan nyaman dalam menggunakan teknologi informasi tersebut, maka akan menimbulkan rasa tenang dan tidak perlu adanya kecemasan yang perlu dikhawatirkan dalam penggunaannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Al-Gahtani dan King (1999) dalam pemanfaatan teknologi informasi ditambahkan variabel persepsi kenyamanan. Variabel persepsi kenyamanan ini memiliki pengaruh terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang diperoleh dari variabel moderasi sikap (*attitude*) dan perhatian perilaku (*behavior intention*). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Studi & Indonesia (2004) juga diperoleh hasil bahwa persepsi kenyamanan yang dirasakan oleh pengguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengguna.

H4: Persepsi Kenyamanan (*perceived enjoyment*) berpengaruh positif terhadap perilaku pengguna (*behavioral intention to use*) pada pengguna *e-wallet* di Denpasar.

Hasil dari penelitian ini diharapkan memperkaya kajian mengenai perilaku dari *user* suatu sistem ataupun suatu teknologi, mengingat penilaian penerimaan maupun suksesnya suatu sistem tidak terlepas dari peran serta dari pengguna.

METODE

Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu di daerah Kota Denpasar, Bali. Alasan memilih lokasi ini karena Kota Denpasar ini dapat dikatakan merupakan pusat dari seluruh aktivitas masyarakat, sehingga Kota Denpasar menjadi sasaran utama untuk melakukan penelitian mengenai perilaku pengguna dalam penggunaan *e-wallet* dan juga dapat dikatakan bahwa masyarakat yang ada di Kota Denpasar cukup mengenal mengenai aplikasi *e-wallet* ini. Selain itu, di Kota Denpasar sudah pernah diadakan peresmian layanan *Quick Response Indonesia Standard (QRIS)* BPD Bali guna menggalakkan transaksi non tunai yang diadakan di Denpasar Festival (Denfest) ke-12 pada hari Sabtu, 28 Desember 2019.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017) mengenai populasi yaitu merupakan jumlah wilayah generasi yang terdapat obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik yang telah ditentukan oleh peneliti yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah semua pengguna yang telah menggunakan aplikasi *e-wallet* yang ada di Denpasar, Bali. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* dapat diartikan sebagai teknik penentuan sampel dengan adanya pertimbangan kriteria tertentu (Sugiyono, 2017). Untuk menentukan ukuran sampel yang digunakan dapat dihitung menggunakan rumus Hair. Rumus Hair digunakan karena ukuran populasi dalam penelitian ini belum diketahui dengan pasti jumlahnya. Menurut Hair (2010) menyarankan bahwa ukuran sampel minimum adalah lima sampai dengan sepuluh observasi untuk setiap indikatornya. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$n = 5 \times \text{jumlah indikator yang digunakan}$

$n = 5 \times 15 \text{ indikator}$

$n = 75 \text{ sampel atau responden}$

Dari perhitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 75 responden. Sehingga dalam hal ini, peneliti mengambil sampel 75 responden untuk mewakili pencarian data dalam penelitian ini dengan kriteria yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini merupakan pengguna aktif dari aplikasi *e-wallet* dan sudah pernah bertransaksi minimal satu kali menggunakan aplikasi *e-wallet*.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yang merupakan penelitian yang mendeskripsikan keadaan yang difokuskan dalam penelitian berdasarkan data berupa angka yang telah diperoleh dan dikumpulkan (Widayat, 2004). Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa hasil jawaban yang diberikan oleh responden melalui kuesioner yang telah dibuat.

Sumber Data

Untuk memperoleh informasi mengenai fakta-fakta mengenai hal-hal yang diperlukan dalam penelitian, maka diperlukan sumber data yang peneliti hasilkan dari sumber data primer. Menurut Sugiyono (2017) mengenai data primer yaitu merupakan sumber data yang sudah langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan merupakan data yang langsung didapatkan dari objek penelitian yaitu pengguna aktif aplikasi *e-wallet* di Denpasar yang dipilih untuk menjadi responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid yang bertujuan dapat dibuktikan, dapat dikembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memecahkan dan mengantisipasi permasalahan dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner akan diberikan kepada para responden untuk perolehan datanya.

Instrumen Penelitian dan Pengujiannya

Dalam penelitian ini, pengumpulan datanya menggunakan pengumpulan data melalui kuesioner, sehingga instrumen penelitian dan pengujiannya yang digunakan yaitu melalui uji validitas dan uji reliabilitas.

Teknik Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini dilakukan bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang telah diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten (Priyatno, 2012). Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara simultan antara persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi risiko, dan persepsi kenyamanan terhadap perilaku pengguna. Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk dapat mengetahui koefisien regresi yang nantinya menentukan apakah hipotesis yang telah disusun akan diterima atau ditolak. Bentuk persamaan regresi linier berganda yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Ghozali, 2013):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Perilaku pengguna (behavioral intention to use)

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi persepsi manfaat (X_1)

β_2 = Koefisien regresi persepsi kemudahan penggunaan (X_2)

β_3 = Koefisien regresi persepsi risiko (X_3)

β_4 = Koefisien regresi persepsi kenyamanan (X_4)

X_1 = Persepsi manfaat (perceived usefulness)
 X_2 = Persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use)
 X_3 = Persepsi risiko (perceived risk)
 X_4 = Persepsi kenyamanan (perceived enjoyment)
 e = Standar error

Uji t (Parsial)

Uji t ini menurut Sanusi (2016) digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X) secara parsial dapat berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) pada tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 5\%$.

Uji F (Simultan)

Uji F ini menurut Sanusi (2016) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara bersama-sama dapat berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) pada tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 5\%$.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) ini digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel dependen (Y) dengan semua variabel independen (X) yang menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya selalu positif. Nilai R^2 menjelaskan proporsi variasi dalam variabel dependen (Y) yang dijelaskan oleh variabel independen secara bersama-sama (Sanusi, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Item Pernyataan	Koefisien Korelasi	Keterangan
1	Persepsi Manfaat	X1.1	0,823	Valid
		X1.2	0,819	Valid
		X1.3	0,827	Valid
		X1.4	0,727	Valid
2	Persepsi Kemudahan Penggunaan	X2.1	0,718	Valid
		X2.2	0,781	Valid
		X2.3	0,804	Valid
		X2.4	0,813	Valid

3	Persepsi Risiko	X _{3.1}	0,776	Valid
		X _{3.2}	0,838	Valid
		X _{3.3}	0,844	Valid
4	Persepsi Kenyamanan	X _{4.1}	0,787	Valid
		X _{4.2}	0,761	Valid
		X _{4.3}	0,826	Valid
		X _{4.4}	0,722	Valid
5	Perilaku Pengguna	Y ₁	0,669	Valid
		Y ₂	0,702	Valid
		Y ₃	0,889	Valid
		Y ₄	0,815	Valid
		Y ₅	0,846	Valid
Nilai r _{tabel}		0,227		

Sumber: Hasil pengolahan data (2020)

Berdasarkan hasil uji diatas pada tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh indikator pernyataan yang terdapat dalam kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel pada penelitian ini yaitu persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi risiko, persepsi kenyamanan, dan perilaku pengguna memiliki koefisien korelasi yang lebih besar dari nilai r_{tabel} yaitu 0,227 sehingga keseluruhan indikator yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Persepsi Manfaat	0,811	Reliabel
2	Persepsi Kemudahan Penggunaan	0,782	Reliabel
3	Persepsi Risiko	0,755	Reliabel
4	Persepsi Kenyamanan	0,771	Reliabel
5	Perilaku Pengguna	0,846	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan data (2020)

Berdasarkan hasil uji diatas pada tabel 2 menunjukkan bahwa kelima variabel dalam penelitian ini yaitu persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi risiko, persepsi kenyamanan, dan perilaku pengguna memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6 sehingga data dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		75	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.32816647	
Most Extreme Differences	Absolute	.149	
	Positive	.096	
	Negative	-.149	
Test Statistic		.149	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	99% Confidence Interval	Lower Bound	.056
		Upper Bound	.068

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber: Hasil pengolahan data (2020)

Berdasarkan uji normalitas diatas pada tabel 3 menunjukkan bahwa besarnya nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0,062 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga data tersebut dapat dinyatakan berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Persepsi Manfaat (X ₁)	.525	1.904
	Persepsi Kemudahan Penggunaan (X ₂)	.512	1.954
	Persepsi Risiko (X ₃)	.754	1.326
	Persepsi Kenyamanan (X ₄)	.597	1.676

- a. Dependent Variable: Perilaku Pengguna (Y)

Sumber: Hasil pengolahan data (2020)

Berdasarkan uji multikolinearitas diatas pada tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,1 dan seluruh variabel independen memiliki nilai VIF < 10,0. Hal ini berarti pada model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.462	1.447		-.319	.751
	Persepsi Manfaat (X ₁)	.142	.091	.252	1.566	.122
	Persepsi Kemudahan Penggunaan (X ₂)	-.001	.109	-.002	-.012	.991
	Persepsi Risiko (X ₃)	-.006	.066	-.013	-.097	.923
	Persepsi Kenyamanan (X ₄)	-.041	.080	-.078	-.519	.606

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Hasil pengolahan data (2020)

Berdasarkan uji heteroskedastisitas diatas pada tabel 5 menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hal ini berarti model regresi ini dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.864	2.267		.822	.414
	Persepsi Manfaat (X ₁)	.293	.142	.211	2.062	.043
	Persepsi Kemudahan Penggunaan (X ₂)	-.036	.170	-.022	-.214	.831
	Persepsi Risiko (X ₃)	.039	.104	.032	.373	.711
	Persepsi Kenyamanan (X ₄)	.836	.125	.642	6.673	.000

a. Dependent Variable: Perilaku Pengguna (Y)

Sumber: Hasil pengolahan data (2020)

Dengan demikian, persamaan analisis regresi linier berganda dapat diketahui sebagai berikut:

$$Y = 1,864 + 0,293X_1 - 0,036X_2 + 0,039X_3 + 0,836X_4 + e$$

Keterangan:

1. Nilai konstanta nya sebesar 1,864 yang artinya jika variabel persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi risiko, dan persepsi kenyamanan = 0 maka perilaku pengguna sebesar 1,864.

2. Variabel persepsi manfaat memiliki koefisien sebesar 0,293 yang berarti persepsi manfaat memiliki pengaruh positif terhadap perilaku pengguna, ini dapat diartikan apabila persepsi manfaat meningkat maka perilaku pengguna juga akan meningkat sebesar 0,293.
3. Variabel persepsi kemudahan penggunaan memiliki koefisien sebesar -0,036 yang berarti persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh negatif terhadap perilaku pengguna, ini dapat diartikan apabila persepsi kemudahan penggunaan meningkat maka perilaku pengguna akan menurun sebesar 0,036.
4. Variabel persepsi risiko memiliki koefisien sebesar 0,039 yang berarti persepsi risiko memiliki pengaruh positif terhadap perilaku pengguna, ini dapat diartikan apabila persepsi risiko meningkat maka perilaku pengguna juga akan meningkat sebesar 0,039.
5. Variabel persepsi kenyamanan memiliki koefisien sebesar 0,836 yang berarti persepsi kenyamanan memiliki pengaruh positif terhadap perilaku pengguna, ini dapat diartikan apabila persepsi kenyamanan meningkat maka perilaku pengguna juga akan meningkat sebesar 0,836.

Uji t (Parsial)

Melalui hasil analisis yang telah dilakukan maka penjelasan dari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

1. Variabel persepsi manfaat memiliki nilai sig-value sebesar 0,043 yang artinya lebih kecil dari nilai p-value yang ditentukan sebesar 0,05 dan koefisien regresinya sebesar 0,293, maka dapat disimpulkan bahwa antara persepsi manfaat terhadap perilaku pengguna terdapat pengaruh positif dan signifikan.
2. Variabel persepsi kemudahan penggunaan memiliki nilai sig-value sebesar 0,831 yang artinya lebih besar dari nilai p-value yang ditentukan sebesar 0,05 dan koefisien regresinya sebesar -0,036, maka dapat disimpulkan bahwa antara persepsi kemudahan penggunaan dengan perilaku pengguna terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan.
3. Variabel persepsi risiko memiliki nilai sig-value sebesar 0,711 yang artinya lebih besar dari nilai p-value yang ditentukan sebesar 0,05 dan koefisien regresinya sebesar 0,039, maka dapat disimpulkan bahwa antara persepsi risiko dengan perilaku pengguna terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan.

4. Variabel persepsi kenyamanan memiliki nilai sig-value sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari nilai p-value yang ditentukan sebesar 0,05 dan koefisien regresinya sebesar 0,836, maka dapat disimpulkan antara persepsi kenyamanan dengan perilaku pengguna terdapat pengaruh positif dan signifikan.

Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan pada uji F ini adalah dengan melihat nilai signifikansi dari F_{hitung} , nilai signifikansi yang digunakan dalam uji F adalah sebesar 0,05. Menurut hasil analisis nilai dari tabel ANOVA menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 27,796 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi risiko, dan persepsi kenyamanan berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap perilaku pengguna dalam penggunaan aplikasi *e-wallet*.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dapat dilakukan dengan menghitung nilai Adjusted R^2 . Koefisien determinasi (R^2) ini digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel dependen (Y) dengan semua variabel independen (X) yang menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya selalu positif. Hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan nilai R^2 sebesar 0,614 yang artinya bahwa pengaruh variabel persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi risiko, dan persepsi kenyamanan terhadap perilaku pengguna dalam penggunaan aplikasi *e-wallet* sebesar 61,4% sedangkan 38,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Pembahasan

Hasil analisis dari uji asumsi klasik yang telah dilakukan dengan menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas yaitu sebagai berikut:

1. Uji normalitas yang dilakukan dengan metode *One Sample Kolmogorov Smirnov* menggunakan pendekatan Monte Carlo menunjukkan bahwa nilai residual berdistribusi normal, karena nilai signifikansinya sebesar 0,062 yang lebih besar dari 0,05.
2. Uji multikolinearitas yang dilakukan menunjukkan bahwa masing-masing variabel yaitu persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi

risiko, dan persepsi kenyamanan memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 serta nilai VIF kurang dari 10,0 sehingga model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan uji Glejser menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Sedangkan, hasil uji regresi linier berganda yang dilakukan dengan uji statistik t, uji statistik F, dan koefisien determinasi menunjukkan bahwa:

1. Persepsi manfaat berpengaruh terhadap perilaku pengguna dalam penggunaan aplikasi *e-wallet*.

Dari hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa adanya pengaruh persepsi manfaat terhadap perilaku pengguna. Hal ini dibuktikan dengan variabel persepsi manfaat memiliki koefisien sebesar 0,293 yang menunjukkan bahwa persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap perilaku pengguna *e-wallet*. Dengan demikian maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti semakin banyak manfaat yang diperoleh oleh pengguna semakin banyak pengguna yang akan menggunakan aplikasi *e-wallet* ini.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syahril & Rikumahu (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Penggunaan *Technology Acceptance Model* (TAM) Dalam Analisis Minat Perilaku Penggunaan *E-Wallet* Pada Mahasiswa Universitas TELKOM yang menyatakan bahwa persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pengguna.

2. Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap perilaku pengguna dalam penggunaan aplikasi *e-wallet*.

Dari hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa adanya pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap perilaku pengguna. Hal ini dibuktikan dengan variabel persepsi kemudahan penggunaan memiliki koefisien sebesar -0,036 yang menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh negatif terhadap perilaku pengguna *e-wallet*. Dengan demikian maka H0 diterima dan H2 ditolak. Hal ini berarti semakin mudah penggunaannya semakin tidak ingin pengguna untuk menggunakan aplikasi tersebut.

3. Persepsi risiko berpengaruh terhadap perilaku pengguna dalam penggunaan aplikasi *e-wallet*.

Dari hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa adanya pengaruh persepsi risiko terhadap perilaku pengguna. Hal ini dibuktikan dengan variabel persepsi risiko memiliki koefisien sebesar 0,039 yang menunjukkan bahwa persepsi risiko berpengaruh positif terhadap perilaku pengguna *e-wallet*. Dengan demikian maka H0 ditolak dan H3 diterima. Hal ini berarti sebesar apapun risiko yang terdapat pada aplikasi tersebut, para pengguna akan tetap menggunakan aplikasi *e-wallet* tersebut.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sienatra (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Dampak Persepsi Manfaat dan Persepsi Risiko Terhadap *Fintech Continuance Intention* Pada Generasi Milenial di Surabaya yang menyatakan bahwa persepsi risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap *fintech continuance intention*.

4. Persepsi kenyamanan berpengaruh terhadap perilaku pengguna dalam penggunaan aplikasi *e-wallet*.

Dari hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa adanya pengaruh persepsi kenyamanan terhadap perilaku pengguna. Hal ini dibuktikan dengan variabel persepsi kenyamanan memiliki koefisien sebesar 0,836 yang menunjukkan bahwa persepsi kenyamanan berpengaruh positif terhadap perilaku pengguna *e-wallet*. Dengan demikian maka H0 ditolak dan H4 diterima. Hal ini berarti semakin pengguna merasa nyaman maka semakin susah untuk lepas dari penggunaan aplikasi *e-wallet* ini.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Studi & Indonesia (2004) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh *Perceived Usefulness*, *Perceived Ease of Use*, dan *Perceived Enjoyment* Terhadap Penerimaan Teknologi Informasi (Studi Empiris di Kabupaten Sragen) yang menyatakan bahwa persepsi kenyamanan yang dirasakan oleh pengguna memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengguna.

5. Persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi risiko, dan persepsi kenyamanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku pengguna *e-wallet*.

Berdasarkan hasil analisis nilai dari tabel ANOVA menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 27,796 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi risiko, dan persepsi kenyamanan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap perilaku pengguna dalam penggunaan aplikasi *e-wallet*.

6. Uji koefisien determinasi yang dilakukan menunjukkan bahwa perhitungan dari nilai R^2 adalah sebesar 0,614 yang artinya bahwa pengaruh variabel persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi risiko, dan persepsi kenyamanan terhadap perilaku pengguna dalam penggunaan aplikasi *e-wallet* sebesar 61,4% sedangkan 38,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini berdasarkan hasil dan pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Dilihat dari koefisien regresinya, persepsi manfaat memiliki koefisien sebesar 0,293. Dengan demikian maka persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap perilaku pengguna dalam penggunaan aplikasi *e-wallet* yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Dilihat dari koefisien regresinya, persepsi kemudahan penggunaan memiliki koefisien sebesar -0,036. Dengan demikian maka persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh negatif terhadap perilaku pengguna dalam penggunaan aplikasi *e-wallet* yang artinya H_0 diterima dan H_2 ditolak.
3. Dilihat dari koefisien regresinya, persepsi risiko memiliki koefisien sebesar 0,039. Dengan demikian maka persepsi risiko berpengaruh positif terhadap perilaku pengguna dalam penggunaan aplikasi *e-wallet* yang artinya H_0 ditolak dan H_3 diterima.
4. Dilihat dari koefisien regresinya, persepsi kenyamanan memiliki koefisien sebesar 0,836. Dengan demikian maka persepsi kenyamanan berpengaruh positif terhadap perilaku pengguna dalam penggunaan aplikasi *e-wallet* yang artinya H_0 ditolak dan H_4 diterima.

5. Dilihat dari nilai R^2 sebesar 0,614 maka dapat dinyatakan bahwa persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi risiko, dan persepsi kenyamanan berpengaruh terhadap perilaku pengguna secara bersama-sama sebesar 61,4%.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat dari penggunaan aplikasi *e-wallet* harus ditingkatkan, semakin efektif penggunaan aplikasi *e-wallet* maka akan banyak terdapat pengguna yang semakin berminat untuk menggunakannya dan diharapkan aplikasi *e-wallet* dapat lebih mengefisien waktu dalam penggunaan saat melakukan suatu transaksi pembayaran.
2. Pada kemudahan penggunaan dalam penelitian ini berpengaruh negatif, sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar meneliti kembali alasan lain persepsi kemudahan penggunaan ini terjadi pengaruh negatif dan tidak signifikan.
3. Risiko yang terjadi dalam penggunaan aplikasi *e-wallet* dapat lebih diminimalisir agar para pengguna tidak perlu merasa cemas saat mereka melakukan transaksi walaupun saat ini pengguna akan tetap menggunakannya sebesar apapun risiko yang kemungkinan akan terjadi saat mengaplikasikannya tapi akan lebih baik jika disediakan berbagai solusi yang dapat diberikan untuk membantu mengatasi risiko-risiko yang terjadi.
4. Kenyamanan dalam menggunakan aplikasi *e-wallet* harus terus dipertahankan dan lebih dikembangkan, dengan menjaga keamanan dan kenyamanan dapat menghilangkan rasa khawatir yang dirasakan oleh pengguna sehingga dapat terus merasa nyaman saat mereka menggunakan aplikasi *e-wallet* sebagai alat transaksi pembayaran.
5. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat mengembangkan penelitian ini dan mengkaji lebih dalam mengenai variabel-variabel lainnya selain yang terdapat dalam penelitian ini yang mempengaruhi perilaku pengguna dalam penggunaan aplikasi *e-wallet*.

DAFTAR PUSTAKA

- Augusty, Ferdinand. 2006. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Skripsi, Thesis dan Disertai Ilmu Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro,
- CNBC Indonesia. (2020). Alasan GoPay, DANA, & LinkAja Cs Kian Digandrungi di RI. (online). (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200115122416-37-130148/alasan-gopay-dana-linkaja-cs-kian-digandrungi-di-ri>, diakses pada 20 Juli 2020).
- Davis, F.D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *Management Information System Quarterly*, 13, 319-340.

- Devita, V.D. (2019). Siapa Aplikasi E-wallet dengan Pengguna Terbanyak di Indonesia? (online). (<https://iprice.co.id/trend/insights/e-wallet-terbaik-di-indonesia/>, diakses pada 14 Agustus 2020).
- Di, M., Jabodetabek, W., Kasus, S., & Layanan, P. (2020). *PENGARUH E-WALLET TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF GENERASI*. December 2019, 0–11.
- Gahtani S. Said., dan Malcolm King. 1999. Attitudes, Satisfaction and Usage: Factors Contributing to Each in the Acceptance of Information Technology. *Behaviour dan Information Technology.*, volume 18, No. 4, 277-297.
- Ghozali, Imam.2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gu, J., Lee, S., Suh, Y. 2009. Determinants of behavioral intention to mobile banking. *Expert System with Application*. 36 (9), 11605-11616.
- Hair, Joseph F. Jr. et al. 2010, *Multivariate Data Analysis 7th Edition*. Pearson Education Limited. Harlow. England
- Hermanto, S. B. and Patmawati, P. (2017) 'Determinan Penggunaan Aktual Perangkat Lunak Akuntansi Pendekatan Technology Acceptance Model', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(2). doi: 10.9744/jak.19.2.67-81.
- Huei, C. T., Cheng, L. S., Seong, L. C., Khin, A. A., Ling, R., & Bin, L. (2018). *Preliminary Study on Consumer Attitude towards FinTech Products and Preliminary Study on Consumer Attitude towards FinTech Products and Services in Malaysia*. June.
- Indonesia, B. (2016). *Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP. 18*.
- Indonesia, Bank. (n.d.). Financial Technology. (online). (<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>, diakses pada 16 Agustus 2020).
- Jin, C. C. (2019). *International Journal of Asian Social Science FACTORS AFFECTING THE CONSUMER ACCEPTANCE TOWARDS* Keyword s. 9(1), 59–65. <https://doi.org/10.18488/journal.1.2019.91.59.65>
- Jogiyanto, 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi.
- Karim, Mustofa Abdul.2017. *Pengaruh Sistem Pembayaran Go-pay Menggunakan TAM (Technology Acceptence Model) Terhadap Intensitas Penggunaan Layanan Gojek*. Skripsi FE UII.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller, 2012. *Manajemen Pemasaran*, Edisi 14, Jilid 1. Jakarta: PT. Indeks.
- Kunci, K., Model, A., Usefulness, P., & Usefulness, P. (2019). *PENGARUH KEBERTERIMAAN LAYANAN PEER TO PEER LENDING KEPADA UMKM SEBAGAI PENGGUNA DENGAN MENGGUNAKAN METODE TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM)*. 5, 151–160.
- Kurniawan, T. A. (2019). *Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Penggunaan FinTech pada UMKM Dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)*. 16(1).

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Syahril, W. N., & Rikumahu, B. (2019). *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*. 3(2), 201–214.
- Widayat. 2004. *Metode Penelitian Pemasaran. Edisi Pertama*. Cetakan Pertama. Malang: CV Cahaya Press.
- Widiyanti, W., Bina, U., & Informatika, S. (2020). *Pengaruh Kemanfaatan , Kemudahan Penggunaan dan Promosi terhadap Keputusan Penggunaan E-wallet OVO di Depok*. 7(1), 54–63.
- Yudha, K.B.K. (2019). *Jangan Salah! Ini Perbedaan E-Money dan E-Wallet Dalam Mempermudah Transaksi*. (online). (<https://www.finansialku.com/perbedaan-e-money-dan-e-wallet/amp/>, diakses pada 28 Agustus 2020).

PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL DAN KETAATAN ATURAN AKUNTANSI TERHADAP KECENDRONGAN KECURANAGAN AKUNTANSI PADA LPD DIKECAMATAN MENGWI

Ni Komang Sumadi¹
Ni Made Dewi Kansa Putri²

¹Universitas Hindu Indonesia, ²Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali, Surel: sumadisamuh@unhi.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effect of the effectiveness of internal control and the obedience of accounting rules. This research was conducted in the LPD in Mengwi District, using the observation method, interview method, literature method, documentation method, and survey method by distributing questionnaires to LPD employees in Mengwi District. The research population was 310 employees. Determination of the sample using non probability sampling method with purposive sampling method. The research sample consisted of 76 employees. Data analysis using Multiple Linear Regression. The results showed that the effectiveness of internal control and compliance with accounting rules had an effect on the tendency of accounting fraud in the LPD in Mengwi District, which means that the higher the effectiveness of internal control, the better the management of financial statements so as to reduce the tendency for accounting fraud and compliance High accounting rules will affect the management of financial statements, the better and in compliance with applicable rules, it can reduce the tendency of accounting fraud, and vice versa.

Key words: effectiveness of internal control, obedience to accounting rules, tendency of accounting fraud

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan, namun utamanya adalah pembangunan di bidang ekonomi dengan tujuan meningkatkan pemanfaatan potensi pembangunan daerah, karena pada dasarnya kegiatan perekonomian daerah merupakan sumber dana utama untuk meningkatkan pembangunan di bidang lainnya. Sistem Keuangan pada dasarnya merupakan tatanan dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki peran dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa dibidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya yang disusun sedemikian rupa untuk memperlancar segala transaksi keuangan yang berlangsung, yang mendukung terjadinya transaksi-transaksi keuangan di suatu negara, demi kemajuan perekonomian negara tersebut.

Perkembangan dunia akuntansi yang semakin pesat tidak hanya membawa manfaat bagi masyarakat tetapi juga menjadi sumber masalah kecurangan (*fraud*) yang sangat kompleks. Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi merupakan suatu tindak penipuan terencana dengan melanggar aturan akuntansi, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan pihak lain dan merupakan keinginan untuk melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak jujur.

Kecurangan akuntansi dapat terjadi karena adanya kondisi yang disebut segitiga kecurangan (*fraud triangle*), yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan pembenaran (*rationalization*). *Opportunity* adalah peluang yang memungkinkan kecurangan terjadi. Biasanya disebabkan karena *internal control* suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang. Hal inilah yang memudahkan pelaku dalam melakukan kecurangan.

Dalam menangani masalah kecurangan, diperlukan monitoring dalam sebuah instansi dan untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik, maka di perlukan pengendalian internal yang efektif (dalam, Budiantari:2017). Penerapan pengendalian internal efektif yang didukung dengan regulasi yang memadai akan mencegah berbagai bentuk persoalan dan ketidakwajaran yang merugikan berbagai pihak yang berkepentingan. Keefektifan pengendalian internal mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya pencegahan kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Adanya pengendalian internal yang efektif, memungkinkan terjadinya pengecekan silang (*cross check*) terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain. Hal ini menurunkan peluang terjadinya kecenderungan kecurangan dan mengalokasikan kesalahan.

Menurut Rahmawati, 2012 (dalam Afri:2017), aturan merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh IAI. Maka dibutuhkan suatu aturan untuk menjaga keandalan informasi tersebut dan menghindari tindakan yang dapat merugikan instansi. Kegagalan penyusunan laporan keuangan yang disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi, akan menimbulkan kecurangan instansi yang tidak dapat dideteksi oleh para auditor.

Kasus kecurangan di Indonesia hampir pernah terjadi di setiap daerah. Organisasi yang memiliki peluang paling besar terjadinya kecurangan (*fraud*) adalah organisasi yang bergerak dibidang keuangan atau di lembaga keuangan. Lembaga jasa keuangan mempunyai peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Hal ini terjadi karena transaksi keuangan biasanya lebih dominan terjadi di lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan baik yang berada di tingkat kabupaten maupun yang berada di tingkat pedesaan. Salah satu lembaga keuangan yang berada di tingkat pedesaan, khususnya di Provinsi Bali adalah lembaga keuangan yang bernama Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi dalam wilayah administrasi tingkat desa. LPD merupakan lembaga berkembang di Provinsi Bali dengan jumlah aset menembus pada angka Rp 21,5 triliun pertahun 2018 (BeritaBali.com, 22 November 2018).

Berdasarkan Data perkembangan LPD di Bali saat ini, sebagaimana terungkap dalam laporan hasil kerja Pansus LPD DPRD Provinsi Bali, tercatat sebanyak 158 LPD (11,03 persen) di Bali yang justru dinyatakan bangkrut karena sudah tidak beroperasi lagi (Bali Tribune, 29 April 2017). Pada Kabupaten Badung terdapat 122 LPD, diantaranya kondisi Sehat (79 LPD), Cukup Sehat (22 LPD), Kurang Sehat (9 LPD), Tidak sehat (4 LPD), dan bangkrut (8 LPD). Penilaian sehat tidaknya sebuah LPD berdasarkan hasil Laporan Kesehatan (Camel) LP-LPD Kabupaten Badung. LPD tersebut bermasalah karena oknum pengurus dan pengawasannya tidak wajar (Denpasar, Post Bali, 28 April 2017).

Penelitian ini akan membahas tentang Efektivitas Pengendalian Internal dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi. Adapun alasan yang mendasari bahwa penelitian ini perlu dilakukan adalah kondisi perkembangan menuntut lembaga keuangan terutama LPD untuk dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam menjalankan operasional usahanya. Selain itu kecenderungan kecurangan yang terjadi pada lembaga keuangan selain LPD seperti KSP dan Bank semakin meningkat sekarang ini.

Standar Profesi Akuntan Publik (2011) mendefinisikan pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap

hukum dan peraturan yang berlaku. Tercapainya pengendalian internal dalam suatu perusahaan dapat meminimalisir kerugian atau pemborosan pengelolaan sumber daya perusahaan. Pengendalian internal juga menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen sebagai pedoman dalam perencanaan selanjutnya (Mulyadi, 2002).

Sistem Pengendalian Internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini sering kali disebut pengendalian dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas tersebut.

H1 : Efektivitas Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kecendrungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi

Menurut Rahmawati (2012) dalam Afri (2017), aturan merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh IAI.

Dengan demikian ketaatan aturan akuntansi merupakan kepatuhan kepada aturan-aturan ataupun standar yang mengikat instansi untuk tunduk pada ketentuan yang berlaku sehingga laporan keuangan menyajikan keadaan dan kondisi yang semestinya.

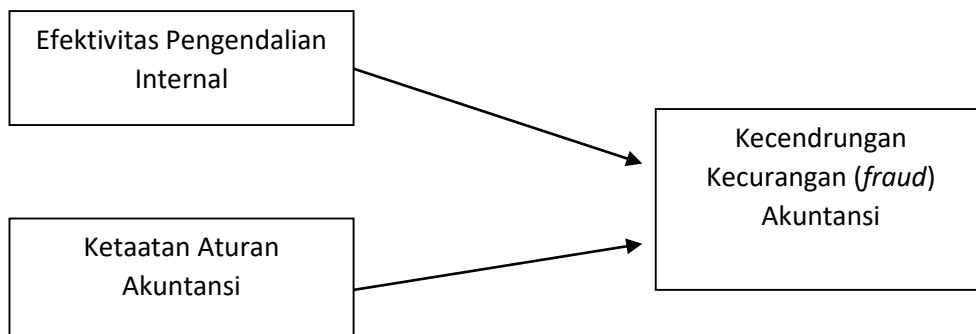
H2 : Ketaatan Aturan Akuntansi Berpengaruh Terhadap Kecendrungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini akan menganalisis pengaruh efektivitas pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi, terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Keefektifan pengendalian internal mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya pencegahan kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi peluang atau kesempatan yang dimiliki oleh karyawan untuk melakukan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Semakin buruk pengendalian internal yang dimiliki oleh suatu instansi, maka semakin besar pula peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Selain itu dengan meningkatkan ketaatan

aturan akuntansi pada suatu instansi dapat mencegah terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi. Sehingga sangat dibutuhkan suatu aturan untuk menjaga keandalan informasi tersebut dan menghindari tindakan yang dapat merugikan instansi. Kegagalan penyusunan laporan keuangan yang disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi, akan menimbulkan kecurangan instansi yang tidak dapat dideteksi oleh para auditor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin instansi/perusahaan taat pada aturan akuntansi, maka semakin rendahnya kecenderungan kecurangan akuntansi pada suatu instansi/perusahaan.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecendrungan Kecurangan (*fraud*) Akuntansi di Kecamatan Mengwi

Penelitian dilakukan di LPD Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, Bali. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif dan data Kuantitatif sedangkan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer meliputi observasi, hasil wawancara dan jawab kuesioner responden pada pegawai LPD yang terlibat dalam bagian keuangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara, Dokumentasi dan Kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan LPD di Kecamatan Mengwi yang berjumlah 38 LPD, yang terdiri dari 310 orang karyawan.

Sampel dalam penelitian ini adalah semua pimpinan/kepala LPD dan pegawai bagian akuntansi/keuangan yang bekerja pada LPD di Kecamatan Mengwi sebanyak 76 orang responden, dengan berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) Seluruh LPD di Kecamatan Mengwi yang terdaftar dan masih aktif di LPLPD Kabupaten Badung, (2) Pimpinan/Kepala, bendahara, dan staf karyawan bagian keuangan atau akuntansi yang berada pada LPD di Kecamatan Mengwi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terkait variabel penelitian. Analisis regresi berganda dipilih untuk menganalisis pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Berikut ini hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan menggunakan program *IBM SPSS Statistics 23.0*.

Tabel 1
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	10.172	2.187		4.651	.000
X1	.510	.110	.443	4.642	.000
X2	.166	.045	.413	3.685	.000

Sumber: Data Diolah

Dengan menggunakan Tabel 1 maka dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut.

$$\text{Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Y)} = 10,172 + 0,443 (X_1) + 0,413 (X_2) + \varepsilon_i$$

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa koefisien regresi sebesar 0,510, dengan nilai t sebesar 4,642 dan sig 0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap variabel kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Hasil penelitian ini mengandung arti bahwa semakin tinggi efektivitas pengendalian internal maka dapat mengurangi terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lia Meliany, dkk (2013) dan Fajar (2018). Yaitu efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Dengan adanya efektivitas pengendalian internal yang tinggi akan mempengaruhi pengelolaan laporan keuangan semakin baik dan taat dengan aturan yang berlaku maka dapat mengurangi terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa koefisien regresi sebesar 0,166, dengan nilai t sebesar 3,685 dan sig 0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap variabel kecenderungan kecurangan (*fraud*)

akuntansi. Hasil penelitian ini mengandung arti bahwa ketaatan aturan akuntansi yang tinggi akan mempengaruhi pengelolaan laporan keuangan semakin baik dan taat dengan aturan yang berlaku maka dapat mengurangi terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ira Gustina (2018). Yaitu ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Dengan adanya ketaatan aturan akuntansi yang tinggi akan mempengaruhi pengelolaan laporan keuangan semakin baik dan taat dengan aturan yang berlaku maka dapat mengurangi terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi di LPD Kecamatan Mengwi. Semakin tinggi efektivitas pengendalian internal akan mempengaruhi pengelolaan laporan keuangan semakin baik dan taat dengan aturan yang berlaku maka dapat mengurangi terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. (2) Ketaatan Aturan Akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Semakin tinggi ketaatan aturan akuntansi akan mempengaruhi pengelolaan laporan keuangan semakin baik dan taat dengan aturan yang berlaku maka dapat mengurangi terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, kesimpulan, berikut saran yang dapat diberikan adalah LPD hendaknya lebih meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi agar segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan instansi dapat berjalan sesuai dengan harapan dan dapat mengurangi kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi yang mungkin dapat terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tidak membebankan karyawan dengan tanggung jawab yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afri, Ade, 2017. *Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi, Moralitas dan Motivasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar)*. Skripsi Universitas Negeri Padang.
- Ardans, Busrah. 2018. *Mantan Ketua LPD Desa Adat Kapal Jadi Tersangka Korupsi Rp 15 Miliar*. <https://www.google.com/amp/bali.tribunews.com/amp/2018/10/24/mantan->

[ketu-lpd-desa-adat-kapal-jadi-tersangka-korupsi-rp-15-miliar](#). Diunduh 7 Desember 2018.

Ardin, Ambrosius. 2017. *Potret LPD di Bali : Kekayaan Rp 15,5 T, Bangkrut Terbanyak di Tabanan*. <https://www.posbali.id/potret-lpd-di-bali-kekayaan-rp155-t-bangkrut-terbanyak-di-tabanan/>. Diunduh 27 November 2018.

Budiantari, Ni Nyoman Ayu, Yuniarta, Gede Adi dan Wahyuni, Made Arie. 2017. *Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Profesional Badan Pengawas dan Moralitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris pada LPD Se-Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung)*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 8 No. 2.

Edison, San. 2017. *150 LPD di Bali Dinyatakan Bangkrut*. <http://balitribune.co.id/content/150-lpd-di-bali-dinyatakan-bangkrut>. Diunduh 27 November 2018.

Gustina, Ira. 2018. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 7, No. 2, Juli – Desember 2018.

LPLPD Provinsi Bali. 2015. *Pelatihan Standarisasi Karyawan LPD Kabupaten/ Kota se Bali*.

Mulyadi. 2002. *Auditing*, Buku 1. Jakarta: Selemba Empat

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa

Sugiyono, Prof. Dr. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Widiutami, Ni Putu Sri. 2017. *Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris Pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng)*, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 7 No. 1.

Widyaswari, Dewa Ayu Nanda, Yuniarta, Gede Adi dan Sujana, Edy. 2017. *Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Budaya Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Susut*, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 8 No. 2.

**PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN AKUNTABILITAS TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG**

(Survei Pada OPD Kabupaten Klungkung)

I Putu Deddy Samtika Putra ¹⁾

Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati ²⁾

Universitas Hindu Indonesia, Email: deddy.samtika@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted by taking the location of the Regional Apparatus Organization (OPD) in the Klungkung Regency Government. The number of samples taken was 143 respondents. The method used was purposive sampling and through non-response bias sample testing. Data collection was carried out by distributing questionnaires. The research instrument used was the validity test and the reliability test. The analysis technique used is the classical assumption test and multiple linear regression analysis, determination analysis, F-test and t-test.

From the results of the study, it is known that regional financial supervision has no effect on the performance of local governments at the Klungkung Regency Government, as evidenced by the t-count = 1.503 with a significance value of $0.135 > 0.05$, thus H1 is rejected. The transparency of regional financial management has a positive effect on the performance of local governments in the Klungkung Regency Government, as evidenced by the value of t-count = 4.365 with a significance value of $0.000 < 0.05$, thus H2 is accepted. Accountability has a positive effect on the performance of the local government at the Service in the Klungkung Regency Government, as evidenced by the t-count = 3.058 with a significance value of $0.003 < 0.05$, thus H3 is accepted.

Keywords: Regional Financial Supervision, Transparency of Regional Financial Management, Accountability and Performance of Local Government

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Kinerja pemerintah dikatakan baik dapat dilihat dari pencapaian hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Kinerja yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian hasil tertentu, harus sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas yang harus dipertanggungjawabkan

(Mohamad Mahsun, 2006:4). Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi dan apabila anggota atau karyawannya baik dan berkualitas, maka kinerja pemerintah daerah akan menjadi baik dan berkualitas juga (Mohamad Mahsun, 2012:141).

Tingginya asumsi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan kinerja pemerintah menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan publik. Hal ini dikarenakan masyarakat belum merasakan kinerja pemerintah secara maksimal (Auditya et al., 2013). Keberhasilan kinerja pemerintahan dapat dinilai dari pembangunan baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Masyarakat luas menilai keberhasilan pembangunan pada bidang ekonomi yang terwujud dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan bukan hanya berarti penekanan pada akselerasi dan keberhasilan di bidang ekonomi, namun meliputi reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Tuntutan agar instansi pemerintah terutama bagi pemerintah daerah untuk dapat mengukur kinerja semakin besar dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Daerah, yang diganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Suatu pengukuran kinerja manajerial yang sah dan dapat dipercaya mutlak diperlukan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Maka pengukuran kinerja manajerial instansi pemerintah patut mendapatkan perhatian yang serius sebab berkaitan dengan tanggung jawab alokasi anggaran daerah. Agar pemerintahan yang baik tersebut menjadi kenyataan dan sukses, maka kualitas pelaksanaan kinerjanya harus ditingkatkan. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk melaksanakan kinerja yang baik dalam menjelaskan tugas dan tanggungjawabnya. harus diakui selama ini aparatur pemerintah dalam tugasnya belum secara optimal memperlihatkan citra dan kinerja yang diharapkan berdasarkan prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Masalah yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu dilihat dari pelayanan yang lamban maupun penyelesaian pembangunan yang tidak tepat waktu. Sehingga penilaian dari masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintahan dinilai sangat rendah. Ini dikarenakan kinerja aparatur pemerintah melenceng dari peraturan-peraturan setiap dinas sehingga masyarakat menuntut agar kinerja pemerintahan yang lebih baik. Tuntutan akan kinerja pemerintah yang baik ini terjadi hampir disemua pemerintahan seiring dengan diterapkannya otonomi daerah dan penetapan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan pemerintah

termasuk di pemerintahan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.

Dikutip dari sumber berita @MetroBali.com : 10 OPD Pemkab Klungkung Dievaluasi Inspektorat Provinsi Bali. SAKIP merupakan salah satu sistem untuk mengetahui akurasi atau kebenaran dari pada implementasi pelaksanaan kinerja OPD di lingkungan Pemkab Klungkung, Bupati Suwirta mengharapkan kepada tim evaluasi disamping melakukan pemeriksaan dan pengawasan, tentunya tim evaluasi dapat melakukan pembinaan kepada OPD di lingkungan Pemkab Klungkung untuk kesempurnaan daripada laporan-laporan maupun perencanaan atau integrasi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaksanaannya, sehingga secara keseluruhan pemeritahan di lingkungan provinsi/kota/kabupaten yang ada di provinsi Bali dapat memberikan laporan kinerja yang semakin baik dan dapat menghasilkan output yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Komponen evaluasi akuntabilitas kinerja yang dievaluasi antara lain, perencanaan, pelaporan, pengukuran, evaluasi dan capaian kinerja dari masing – masing OPD di lingkungan pemerintahan provinsi/kota/kabupaten. Dalam menyusun laporan SAKIP terdapat enam (6) indikator yang perlu dicermati antara lain, apakah indikator kinerja sudah memenuhi unsur SMART, yaitu *Spesifik* (jelas), *Measureable* (dapat diukur), *Archivable/Attainable* (dapat diraih), *Relevant* (relevan dengan kinerja yang ingin diukur), *Time Bound* (memiliki batasan waktu pengukuran).

Transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klungkung memperoleh penghargaan dari Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati. Penghargaan ini merupakan yang ketiga kali diraih atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi tahun 2017 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menyatakan perolehan penghargaan ini tidak terlepas dari kerja keras dan kordinasi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Akan tetapi belum sepenuhnya aparat pemerintah bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, itu dibuktikan dengan terungkapnya kasus Korupsi pada Proyek Biogas di Kecamatan Nusa Penida. Dikutip dari berbagai sumber terpercaya seperti Bali Post, Nusa Bali, IDN Times Bali dan hasil Laporan Audit dari BPK.

Kasus tersebut ditangani Kejaksaan Negeri Klungkung sejak tahun 2015 silam, Hasil audit BPK terkait kerugian negara dari proyek tersebut baru turun sekitar bulan

Agustus tahun 2018 dan diketahui nilainya mencapai Rp. 792.000.000. Dengan terjadinya kasus ini sudah sangat jelas merugikan masyarakat luas yang tidak bisa merasakan hasil dari program yang di rencanakan pemerintah, hanya karena beberapa oknum yang dengan sengaja ingin mencari keuntungan pribadi. Masyarakat menilai masih belum optimal kinerja aparat pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas dan tanggungjawab terutama dibidang pengelolaan anggaran dan keuangan pemerintah.

Selain pengawasan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya untuk dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial maupun politik sehingga akan berdampak baik bagi masyarakat. Dengan begitu kinerja pemerintah dapat dikatakan baik apabila masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah. Hal ini berarti semakin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Auditya et al., 2013, Wiguna et al., (2015), Adiwirya dan Sudana (2015). Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.

Teori dasar yang digunakan adalah *Agency theory* yang membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. *Agency theory* memandang bahwa agen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan *principal* (Tricker, Opcit, 1984).

Menurut Halim dan Iqbal, (2012:37), secara umum pengawasan dapat dirumuskan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga

dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator: Kualitas Pengawasan, Standar Pengawasan, Peningkatan Pengawasan dan Tugas Pengawasan.

Standar Akuntansi Pemerintah (2010) menyebutkan bahwa Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator: Prinsip Transparansi, Penyajian Tranparansi, Terakomodasinya suara/usulan rakyat, Kebijakan Transparansi dan Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator: Pertanggungjawaban pemerintah secara terbuka, menyediakan informasi secara cepat dan tepat kepada masyarakat, Pengawasan laporan keuangan, Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik dan Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. (Adisasmita (2011:89).

Mohamad Mahsun (2012:141) mendefinisikan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi dan apabila anggota/karyawannya baik dan berkualitas, maka kinerja pemerintah daerah akan menjadi baik dan berkualitas juga. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator: Peran pemerintah untuk menerima aspirasi masyarakat, Perencanaan anggaran, Pengendalian anggaran, Target program pemerintah dan Pemerintahan yang adil dan jujur.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat yang dilandasi dengan tinjauan pustaka maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 : Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

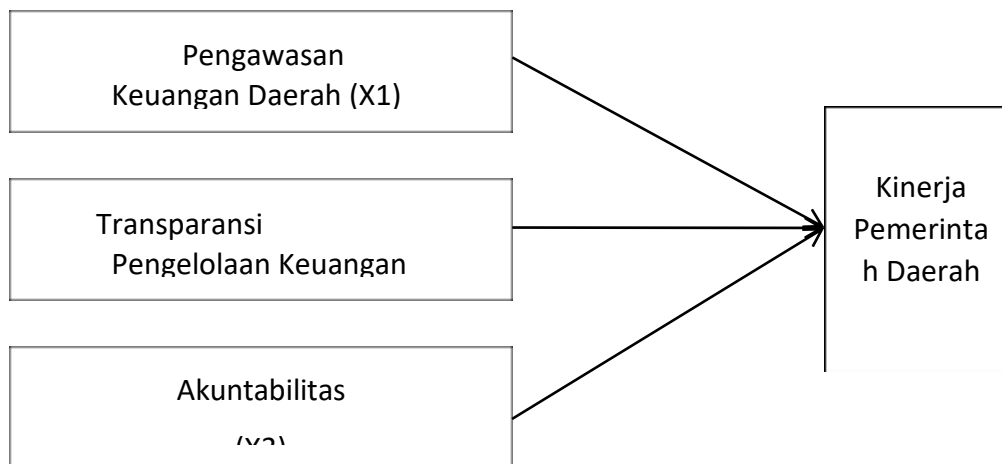
Kabupaten Klungkung.

H2 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.

H3 : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.

METODE PENELITIAN

Kinerja pemerintah dikatakan baik dapat dilihat dari pencapaian hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Kinerja yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian hasil tertentu, harus sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas yang harus dipertanggungjawabkan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pejabat setingkat Kepala Dinas/Badan/Inspektur, Kepala Bagian, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepala Sub Bagian Umum di seluruh OPD Kabupaten Klungkung dan mempunyai masa kerja minimal satu tahun. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan diperoleh jumlah sampel sebanyak 152 orang responden.

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan dalam persamaan regresi berikut ini:

$$Y = 0,011 + 0,139 X1 + 0,413 X2 + 0,228 X3 + \epsilon_i$$

Keterangan :
 Y : Kinerja Pemerintah Daerah
 α : Konstanta
 β_1 : Koefisien Regresi Pengawasan Keuangan Daerah
 β_2 : Koefisien Regresi Transparansi Pengelolaan Keuangan
 β_3 : Koefisien Regresi Akuntabilitas
 X_1 : Pengawasan Keuangan Daerah
 X_2 : Transparansi Pengelolaan Keuangan
 X_3 : Akuntabilitas
 e : Error

HASIL PENELITIAN

Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuisisioner sebanyak 152 kuisisioner dan kuisisioner yang dapat diolah sebanyak 143 kuisisioner. Pengujian instrumen penelitian baik dari segi validitasnya maupun reliabilitasnya terhadap 143 responden diperoleh bahwa hasil instrumen penelitian yang dipergunakan adalah valid dimana nilai korelasinya lebih besar dari 0,3 dan koefisien keandalannya (*Cronbach Alpha*) lebih besar dari 0,5. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui asumsi ini, dilakukan pengujian menggunakan uji statistik *non-parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Suatu variabel dikatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansinya $> 0,05$. Adapun hasil pengujian adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		143
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.01482486
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.063
	Negative	-.090
Kolmogorov-Smirnov Z		1.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.201

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas, nilai sig 0,201 sebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual atau model regresi berdistribusi normal.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* dan *variance*

inflation factor (VIF). Adapun hasil pengujian adalah sebagai berikut.

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	T		Tolerance	VIF
1 (Constant)	.011	.171		.066	.948		
FdX1	.139	.093	.120	1.503	.135	.682	1.465
FdX2	.413	.095	.393	4.365	.000	.535	1.869
FdX3	.228	.074	.240	3.058	.003	.705	1.419

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 2 bahwa nilai *tolerance* pada variabel pengawasan keuangan daerah (X1) sebesar 0,682, transparansi pengelolaan keuangan daerah (X2) sebesar 0,535 dan akuntabilitas (X3) sebesar 0,705 > 0,10, sedangkan nilai VIF (*Varian Inflation Factor*) variabel pengawasan keuangan daerah (X1) sebesar 1,465, transparansi pengelolaan keuangan daerah (X2) sebesar 1,869 dan akuntabilitas (X3) sebesar 1,419 < 10. Maka pada model regresi yang terbentuk tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Metode ini dilakukan dengan meregresi nilai *absolut* residual dengan variabel bebas. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka dikatakan model bebas dari heteroskedastisitas. Adapun hasil uji multikolinieritas dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3 Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.496	.114		13.141	.000
FdX1	-.004	.062	-.007	-.066	.947
FdX2	-.021	.063	-.038	-.331	.741
FdX3	.019	.050	.039	.389	.698

a. Dependent Variable: Abs_Ut

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Tabel 3 pada variabel pengawasan keuangan daerah (X1) sebesar 0,947, transparansi pengelolaan keuangan daerah (X2) sebesar 0,741 dan akuntabilitas (X3) sebesar 0,689 sebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sudah tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk melihat pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam model regresi linier berganda ini,

variabel independen yang digunakan adalah pengawasan keuangan daerah (X_1), Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X_2), dan sistem Akuntabilitas (X_3). Sedangkan untuk variabel dependen menggunakan Kinerja Pemerintah Daerah (Y). Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS untuk analisis regresi linier berganda, diperoleh hasil yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.011	.171	.120	.066	.948
	FdX1	.139	.093	.393	1.503	.135
	FdX2	.413	.095	.240	4.365	.000
	FdX3	.228	.074		3.058	.003

a. Dependent Variable: FdY

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda untuk variabel dependen Kinerja Pemerintah Daerah yang telah diperoleh, terdapat nilai konstanta sebesar 0, yang artinya jika variabel Kinerja Pemerintah Daerah tidak dipengaruhi oleh semua variabel independen, maka besarnya rata-rata Kinerja Pemerintah Daerah adalah 0,011. Nilai-nilai koefisien regresi pada variabel-variabel bebasnya menunjukkan jika variabel bebasnya dinaikkan nilai sebesar satu unit dan variabel bebas lainnya konstanta atau nilai lainnya sama dengan nol, maka nilai variabel dependen akan disesuaikan dengan koefisien regresinya

Uji Ketepatan Perkiraan (Koefisien Determinasi R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai yang digunakan dalam koefisien determinasi adalah dengan menggunakan nilai *R-Square*. Nilai tersebut yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Hasil pengujian menggunakan SPSS didapatkan nilai koefisien determinasi seperti yang tertera dalam Tabel 5 :

Tabel 5

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.633 ^a	.401	.388	2.03661

a. Predictors: (Constant), FdX3, FdX1, FdX2

Sumber: Data Diolah

Nilai *R Square* yang diperoleh berdasarkan Tabel 5 adalah sebesar 0,388, hal ini berarti variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 38,80%, sedangkan sisanya 67,10% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan kedalam model regresi dalam penelitian ini.

Secara simultan, pengujian model dilakukan dengan uji F-test. Menurut Ghazali, (2011:98). Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Uji f-test digunakan untuk menguji model, yaitu pengaruh pengawasan keuangan daerah, transparansi Pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah. Ketentuan yang digunakan dalam uji F adalah jika signifikansi $\leq 0,05$, maka model regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 6 Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	382.601	3	127.534	30.748	.000 ^b
	Residual	572.392	138	4.148		
	Total	954.993	142			

a. Dependent Variable: FdY
 b. Predictors: (Constant), FdX3, FdX1, FdX2
 Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil pengujian diatas, ternyata dengan tingkat keyakinan diri 95%, kesalahan 5% dan derajat bebas pembilang 3 dan derajat penyebut 138, nilai F_{hitung} sebesar 30,748 dengan signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dengan demikian model penelitian dapat diterima, sehingga model regresi dapat digunakan terhadap mengukur Kinerja Pemerintah Daerah.

Secara parsial pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-test. Menurut Ghazali, (2011:98). Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen digunakan untuk menguji hipotesis H_1 , H_2 & H_3 , yaitu pengaruh pengaruh pengawasan keuangan daerah (X1), transparansi Pengelolaan keuangan daerah (X2), dan akuntabilitas (X3) secara parsial terhadap kinerja pemerintah daerah (Y) pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Tabel 7 Hasil Uji Statistik t-test

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.011	.171		.066	.948
	FdX1	.139	.093	.120	1.503	.135
	FdX2	.413	.095	.393	4.365	.000
	FdX3	.228	.074	.240	3.058	.003

a. Dependent Variable: FdY

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan hasil uji, tampak jelas bahwa variabel pengaruh pengawasan keuangan daerah (X1) nilai $t_{hitung} = 1,503$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,135, maka ternyata nilai signifikansi hitung lebih besar dari 0,05, dengan demikian H_1 ditolak. Ini berarti bahwa secara statistik untuk uji satu sisi pada taraf kepercayaan $(\alpha) = 5\%$, secara parsial pengaruh pengawasan keuangan daerah (X1) tidak berpengaruh terhadap terhadap kinerja pemerintah daerah (Y) pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Artinya jika terjadi semakin tinggi pengawasan keuangan daerah (X1) akan menurunkan kinerja pemerintah daerah (Y) pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Dengan demikian hipotesis penelitian tidak teruji kebenarannya.

Variabel transparansi Transparansi Pengelolaan keuangan daerah (X2) nilai $t_{hitung} = 4,365$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, maka ternyata nilai signifikansi hitung lebih kecil dari 0,05, dengan demikian H_2 diterima. Ini berarti bahwa secara statistik untuk uji satu sisi pada taraf kepercayaan $(\alpha) = 5\%$, secara parsial transparansi Transparansi Pengelolaan keuangan daerah (X2) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah (Y) pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Artinya jika terjadi semakin tinggi Transparansi Pengelolaan keuangan daerah (X2) akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Y) pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Transparansi Pengelolaan keuangan daerah (X2) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah (Y) pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung teruji kebenarannya.

Variabel akuntabilitas (X3) nilai $t_{hitung} = 3,058$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,003, maka ternyata nilai signifikansi hitung lebih kecil dari 0,05, dengan demikian H_3 diterima. Ini berarti bahwa secara statistik untuk uji satu sisi pada taraf kepercayaan $(\alpha) = 5\%$, secara parsial akuntabilitas (X3) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

(Y) pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Artinya jika terjadi semakin tinggi akuntabilitas (X3) akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Y) pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa akuntabilitas (X3) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah (Y) pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung teruji kebenarannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan, maka didapat simpulkan hasil penelitian sebagai berikut: Pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengawasan keuangan daerah maka akan mengakibatkan pegawai dapat merasa tertekan karena kurangnya mendapat kesempatan untuk pengembangan diri sehingga membuat kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung juga akan menurun.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik transparansi pengelolaan keuangan daerah maka kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung juga akan meningkat.

Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Hal ini menunjukkan semakin baik akuntabilitas maka kinerja pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung juga akan meningkat.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, berikut beberapa saran yang dapat diberikan: (1) Bagi Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung Diharapkan dapat terus meningkatkan pemahaman Pengawasan Keuangan Daerah yang dimiliki oleh setiap pegawai baik dari pimpinan, subbagian bahkan pegawai dengan melalui program pelatihan dan agar Kinerja Pemerintah Daerah yang dihasilkan dari pemerintah dapat ditingkatkan. Pemerintah sebaiknya juga melakukan pengkajian ulang mengenai pengawasan keuangan daerah. (2) Agar pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana dengan efektif, sebaiknya peralatan yang usang/rusak didata secepat mungkin. sehingga kegiatan pembuatan laporan keuangan tidak terganggu oleh peralatan yang rusak tersebut. maka kinerja pemerintah daerah pelaporan keuangan dapat dihasilkan tepat waktu. (3) Diharapkan dapat terus meningkatkan Akuntabilitas agar mendapatkan hasil dari nilai informasi yang lebih baik serta pemerintah sebaiknya juga melakukan pengkajian ulang mengenai Akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Adiwirya, M Firdiansyah dan Sudana Putu. 2015. *Akuntabilitas, Transparansi dan Anggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar*. E-Jurnal Akuntansi.
- Asrida, 2012. *Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Bireuen*. Jurnal Kebangsaan. 1(1). 29- 40.
- Auditya, Lucy., Husaini dan Lismawati. 2013. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Fairness.
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama*, Salemba empat, Jakarta
- Harahap, Sofyan Syafri. 2012. *Teori Akuntansi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2011. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*
- Mahsun, Mohamad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Wiguna, Made BS., Yuniartha G., dan Darmawan N. 2015. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

PERAN KUALITAS AUDIT DALAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN KELUARGA DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DENGAN PENGHINDARAN PAJAK

Salma Afrilia¹⁾

Masripah²⁾

Ermawati³⁾

^{1, 2, 3)} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, email: salmaafriia03@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of audit quality in the relationship between family ownership and institutional ownership with tax avoidance in listed manufacturing companies in the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. This study is a quantitative research using random effect model. This study uses secondary data in the form of company annual reports. Sample of this study is 71 manufacturing companies. The data analysis technique used are the regression model selection test, classic assumption test, multiple regression analysis test, and hypothesis testing. The results of data analysis indicate that (1) family ownership has a significant positive effect on tax avoidance, (2) institutional ownership has a significant negative effect on tax avoidance, (3) audit quality has no role in weakening the relationship between family ownership and tax avoidance, and (4) audit quality has no role in strengthening the relationship between institutional ownership and tax avoidance.

Keywords: Family Ownership; Institutional Ownership; Audit Quality; Tax Avoidance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan komponen utama dalam pendapatan negara berupa pungutan wajib masyarakat, baik orang pribadi maupun badan, yang diatur oleh pemerintah secara langsung maupun tidak langsung untuk pembangunan nasional secara berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam merefleksikan implikasi kebijakan pemerintah pada perpajakan, rasio pajak digunakan sebagai salah satu indikator pengukuran penerimaan pajak dengan cara membandingkan persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut hasil pengamatan yang diterbitkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), mengatakan rasio pajak Indonesia yang diukur terhadap PDB pada tahun 2019 hanya 10,7 persen sedangkan rata-rata OECD sebesar 34,3 persen. Angka tersebut dapat dikatakan tertinggal apabila ditimbang dengan rasio pajak Malaysia dengan rasio 13,6 persen dan Singapura dengan rasio 14,1 persen.

Dalam laporan OECD yang bertema *Revenue Statistic in Asia Pacific Economies 2019*, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rasio pajak Indonesia masih rendah, salah

satunya adalah penghindaran pajak. Perusahaan selaku subjek pajak penghasilan negara memiliki perbedaan sudut pandang dengan pemerintah terkait pemaknaan pajak. Perusahaan sebagai entitas yang mementingkan keuntungan menilai pajak sebagai sebuah beban yang akan mengancam rendahnya laba perusahaan (Putri, 2015). Namun, di sisi lain pemerintah menganggap pajak sebagai iuran wajib para subjek pajak untuk mengoptimalkan penerimaan kas negara. Perbedaan tersebut memotivasi perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan realisasi pajak turun (Darmawan and Sukartha, 2014).

Maraknya praktik penghindaran pajak di Indonesia tidak terlepas dari struktur kepemilikan perusahaan yang memiliki peran dalam penetapan suatu kebijakan di perusahaan. Kepemilikan keluarga merupakan salah satu bagian dari struktur kepemilikan yang terdiri dari orang pribadi dan perusahaan lokal dengan persentase di atas lima persen, yang mana bukan termasuk perusahaan publik, negara ataupun institusi keuangan (Villalonga and Amit, 2006). Keberadaan kepemilikan keluarga sebagai pemegang saham mayoritas dapat menyebabkan konflik keagenan, bukan lagi terjadi pada agen perusahaan dengan pemegang saham, tetapi pemegang saham mayoritas dengan minoritas dalam mengambil kebijakan perusahaan (Masripah, Diyanty and Fitriasar, 2015).

Salah satu kebijakan yang dipilih adalah kebijakan perpajakan terkait tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan guna meningkatkan keuntungan yang didapat melalui pengurangan beban perusahaan. Menurut Gaaya *et al.*, (2017), perusahaan keluarga cenderung agresif terhadap pajak daripada perusahaan non-keluarga akibat peluang keuntungan yang dimilikinya. Keuntungan dari penghematan pajak di perusahaan lebih besar daripada kemungkinan terkena denda pajak dan kerugian akibat reputasi perusahaan yang rusak, sehingga menciptakan peluang bagi pemegang saham mayoritas dalam mendorong manajer untuk turut terlibat dalam pemilihan kebijakan perusahaan.

Penelitian terkait penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh kepemilikan keluarga sudah banyak dilakukan. Hasil penelitian Praptidewi dan Sukartha (2016), Gaaya *et al.*, (2017), serta Wirdaningsih *et al.*, (2018) menunjukkan perusahaan dengan penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan oleh struktur kepemilikan keluarga. Akan tetapi, Maharani dan Juliarto (2019) serta Wijayani (2016) menyatakan hal berbanding terbalik, dimana penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan keluarga.

Peran pemilik perusahaan yang direfleksikan melalui sebuah persentase seberapa besar porsi kepemilikan dari setiap pihak yang diyakini memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dengan mengawasi setiap kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen. Salah satu struktur kepemilikan tersebut dimiliki oleh pihak institusi, seperti yayasan, bank, perusahaan investasi, dana pensiun, dan institusi lain (Edison, 2017). Kepemilikan institusional mengindikasikan adanya kemampuan dalam meningkatkan pengawasan yang lebih optimal kepada kinerja manajer perusahaan guna mengurangi masalah keagenaan (Winata, 2014). Kepemilikan saham institusi yang semakin tinggi akan meningkatkan pengawasan kepada manajemen dalam penyusunan laporan keuangan.

Kepemilikan institusional diyakini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penghindaran pajak oleh perusahaan, salah satunya di sektor manufaktur. Sektor manufaktur menjadi sektor yang esensial untuk diawasi karena perannya sebagai salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar di Indonesia menjadikannya sebagai salah satu penopang perekonomian negara. Pengawasan terhadap manajemen akan mampu mengurangi perilaku oportunistik manajer dalam memutuskan sebuah kebijakan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian Krisna (2019), dikatakan adanya indikasi dorongan dari investor institusi kepada manajer perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak, sehingga tidak merugikan kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang. Dilihat dari hasil tersebut, kepemilikan institusional mampu menciptakan kontrol perusahaan terutama dalam mengurangi tindakan oportunistik manajer yang lebih mementingkan keuntungan pribadi (Wijayani, 2016).

Penelitian terkait penghindaran pajak yang dipengaruhi kepemilikan institusional telah banyak dilakukan. Pada penelitian Wijayani (2016), Khan *et al.*, (2017), dan Krisna (2019) menghasilkan kesimpulan bahwa adanya pengaruh negatif signifikan dari kepemilikan institusional kepada penghindaran pajak. Berbeda pada penelitian milik Tandean dan Winnie (2016) dan Septiadi *et al.*, (2017) yang menyatakan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional.

Berbagai upaya dilakukan dalam mengurangi praktik penghindaran pajak, salah satunya dengan penerapan komponen tata kelola perusahaan, yaitu dengan kualitas audit yang memiliki prinsip transparansi pada laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. DeAngelo dan Masulis (1980) mengatakan bahwa kualitas audit dianggap sebagai solusi dalam yang mampu mengontrol tindak kecurangan manajer dalam laporan keuangan. Dengan adanya transparansi pada laporan keuangan menjadi salah satu wujud keterbukaan

informasi kepada pengguna laporan keuangan terkait kondisi keuangan perusahaan dan prospek ke depan perusahaan.

Auditor independen merupakan salah satu pihak eksternal yang memiliki kemampuan dalam menemukan salah saji material pada laporan keuangan serta mampu melaporkan kesalahan tersebut guna menjaga informasi yang dimuat pada laporan keuangan dan mencerminkan nilai dari suatu perusahaan. Auditor pada KAP *The Big Four* diyakini lebih berpengalaman dan profesional serta mampu menjaga reputasinya dengan menyajikan kualitas audit yang tinggi (Krisna, 2019). Kemampuan auditor dalam menentukan tingkat materialitas dengan tepat serta mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan yang disusun pihak manajemen dapat meningkatkan kualitas audit. Laporan keuangan auditan yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan. Sehingga, dalam pengambilan kebijakan perusahaan kepemilikan saham perusahaan atau investor juga harus memperhatikan peran auditor eksternal tersebut sebagai pemeriksa laporan keuangan yang mencerminkan aktivitas operasional perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Kualitas Audit dalam Hubungan Kepemilikan Keluarga dan Kepemilikan Institusional dengan Penghindaran Pajak”. Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 1) Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak?, 2) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak?, 3) Apakah pengaruh kualitas audit memperlemah hubungan antara kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak?, 4) Apakah pengaruh kualitas audit memperkuat hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis secara empiris pengaruh signifikan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak, 2) Untuk menganalisis secara empiris pengaruh signifikan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, 3) Untuk menganalisis secara empiris pengaruh kualitas audit dalam memperlemah hubungan antara kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak, 4) Untuk menganalisis secara empiris pengaruh kualitas audit dalam memperkuat hubungan antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini dibangun menggunakan *grand theory* yaitu teori keagenan. Teori keagenan merupakan suatu kontrak yang dilakukan dengan menempatkan pemilik modal atau pemegang saham sebagai *principal* yang mempekerjakan pihak manajemen sebagai

agen untuk melakukan jasa kepada perusahaan dan diberikan wewenang dalam mengelola usaha demi kepentingan *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Hal tersebut berarti, agen harus mampu menetapkan kebijakan terbaik untuk meningkatkan kekayaan para pemegang saham (Sugiarto, 2011).

Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai alat yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan informasi terkait kinerja perusahaan dalam satu periode. Informasi pada laporan keuangan perlu disajikan secara lengkap, akurat, dan transparan guna mengurangi asimetri informasi. Namun, akibat adanya pemisahan kepemilikan terkadang menyebabkan adanya kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) antara pemegang saham dengan agen (Lisa, 2012). Ketidakseimbangan informasi ini terjadi akibat pihak agen yang mendapatkan pengetahuan cukup banyak tentang kondisi dan prospek ke depan perusahaan daripada pemegang saham yang hanya menerima informasi dari hasil laporan yang diberikan oleh agen. Akibatnya, agen memiliki *self interest* untuk melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri dengan mengambil keputusan yang merugikan pemegang saham perusahaan.

Masalah keagenan yang timbul tidak lagi menjadi masalah antara pemegang saham dengan agen, melainkan antar pemegang saham, yaitu mayoritas dan minoritas. Hal tersebut karena tingginya persentase kepemilikan keluarga menempatkan anggota keluarga sebagai pemegang saham mayoritas yang memiliki hak kendali dalam proses penentuan kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Gaaya *et al.* (2017) dan Wirdaningsih *et al.* (2018) mengatakan bahwa kepemilikan keluarga yang tinggi akan mendorong pemegang saham lebih agresif terhadap pajak untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Kepemilikan Keluarga Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Penghindaran Pajak

Struktur kepemilikan memiliki arti penting dalam sebuah perusahaan yang diyakini mampu mengoptimalkan kinerja perusahaan, salah satunya adalah kepemilikan institusional (Winata, 2014). Kepemilikan institusional yang diprosikan dari persentase jumlah saham yang dimiliki institusi atau lembaga lain terhadap jumlah saham perusahaan yang beredar dapat berfungsi sebagai pengendali eksternal perusahaan guna mengurangi kemungkinan terjadinya masalah keagenan (*agency problem*). Pernyataan ini sesuai dengan penelitian

Krisna (2019) yang mengatakan semakin kecil kepemilikan oleh institusi maka semakin mudah bagi manajer untuk melakukan penghindaran pajak, dengan kata lain kepemilikan institusional mampu mengurangi kemungkinan manajemen melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Kepemilikan Institusional Berpengaruh Negatif Signifikan terhadap Penghindaran Pajak

Keberadaan kepemilikan keluarga sebagai pemegang saham mayoritas dapat menyebabkan masalah keagenan yang baru, bukan lagi agen dengan pemegang saham, tetapi terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Masripah *et al.*, 2015). Perannya sebagai pemegang saham mayoritas mendukung untuk mengontrol keputusan yang akan diambil manajer sesuai dengan kepentingannya, salah satunya terkait penghindaran pajak (Maharani & Juliarto, 2019). Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, membutuhkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, salah satunya dengan kualitas audit guna mengontrol tindakan pemegang saham mayoritas dalam membuat kebijakan, terutama tentang kebijakan penghindaran pajak. Kualitas audit yang tinggi akan mampu meningkatkan pengawasan kepada manajer dalam menyusun laporan keuangan, sehingga dapat mengurangi kesempatan pemegang saham mayoritas dalam memanfaatkan hak kendalnya untuk mendorong manajemen dalam melakukan penghindaran pajak (Gaaya *et al.*, 2017). Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Kualitas Audit Memperlemah Pengaruh Signifikan Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak

Peran kepemilikan institusional suatu perusahaan dapat mengurangi terjadinya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal dalam menjalankan penyusunan laporan keuangan akibat mekanisme pengawasan yang dilakukan guna mencegah perilaku oportunistik manajer (Jensen and Meckling, 1976). Proporsi kepemilikan saham perusahaan yang tinggi, memberi kendali yang cukup besar bagi investor institusi dalam melakukan pengontrol kinerja manajer untuk lebih berhati-hati atas setiap kebijakan yang ditetapkan, salah satunya terkait kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, peran kualitas audit dibutuhkan untuk mengevaluasi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Kualitas audit

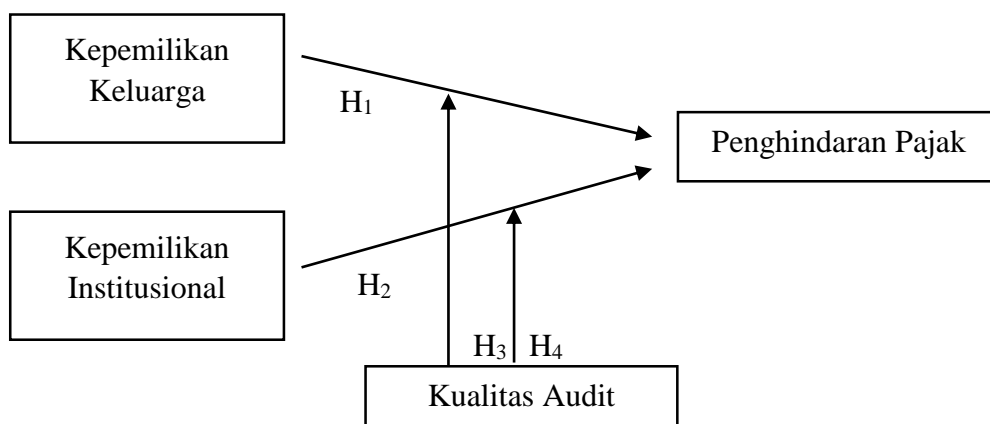
diyakini dapat mengontrol tindakan manajer dalam menjalankan tugasnya (DeAngelo & Masulis, 1980). Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Krisna (2019) bahwa kualitas audit memperkuat pengaruh kepemilikan institusional pada penghindaran pajak karena hasil audit laporan keuangan auditor KAP *The Big Four* memberi efek kepada manajer untuk lebih berhati-hati dalam melakukan mengambil keputusan, salah satunya terkait penghindaran pajak. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Kualitas Audit Memperkuat Pengaruh Signifikan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel terikat (independen) adalah Penghindaran Pajak, dengan menggunakan dua variabel bebas (Independen), yaitu Kepemilikan Keluarga (X1) dan Kepemilikan Institusional (X2). Variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu kualitas audit (Z). Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan mengakses *website* resminya di www.idx.co.id dan situs-situs resmi dari setiap perusahaan dengan periode selama 3 tahun, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual dari penelitian ini, sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

Populasi pada penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kemudian diseleksi berdasarkan karakteristik tertentu karena populasi dirasa terlalu besar dan memakan waktu, tenaga, dan dana yang cukup besar (Sugiyono, 2019 hlm.127). Penentuan sampel dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti dengan harapan mendapatkan sampel sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun kriteria sampel yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut selama tahun 2017-2019.
- b. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan tahunan secara berturut-turut selama tahun 2017 – 2019.
- c. Perusahaan manufaktur yang membukukan laba selama tahun 2017 – 2019 agar dapat menghitung jumlah kewajiban perpajakan perusahaan.
- d. Kepemilikan keluarga lebih dari 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif diterapkan untuk menggambarkan kondisi data dari objek penelitian secara mendalam. Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel yang diteliti melalui nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, minimal, dan maksimal. Berikut merupakan hasil pengolahan data statistik deskriptif dari setiap variabel pada Tabel 1:

Tabel 1. Data Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BTD (Y)	177	-0.03089	0.08458	0.004640	0.019974
FAM (X1)	177	6.9326	95.5303	58.27285	24.40401
INST (X2)	177	0	99.7112	67.89933	22.49719
QAUD (Z)	177	0	1	0.293785	0.456787
FAM*QAUD	177	0	95.5303	16.30613	29.47248
INST*QAUD	177	0	99.7112	21.29704	34.6894

Sumber: *Output STATA v.16.0* dan telah diolah

Setelah itu dilakukan uji pemilihan model regresi. Setelah menguji uji *chow*, uji *hausman*, maka dilakukan uji *lagrange multiplier* untuk menentukan model estimasi regresi antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Random Effect Model* (REM). Berdasarkan tabel 8, dapat dilihat hasil pengujian *lagrange multiplier* bahwa nilai probabilitas pada model 1 dan model 2 adalah 0.0000 yang mana lebih kecil dari nilai α (0.05). Oleh karena itu, dari

hasil uji *lagrange multiplier* dapat diputuskan model *Random Effect Model* (REM) yang digunakan pada kedua model persamaan.

Tabel 2. Hasil Uji *Lagrange Multiplier*

	<i>Probability</i>	α
Model 1	0.0000	0.05
Model 2	0.0000	0.05

Sumber: *Output* STATA v.16.0 dan telah diolah

Setelah ditemuka model regresi pada penelitian, maka dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui pemenuhan syarat dari uji asumsi klasik dan memutuskan model regresi yang dapat digunakan sebagai alat estimasi penelitian (Ghozali, 2018 hlm.175). Model regresi yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM), dimana perhitungan yang dilakukan menggunakan metode *Generalized Least Squares* (GLS) sehingga tidak perlu lagi dilakukan uji autokorelasi dan heteroskedastisitas (Fajar, 2013). Oleh karena itu, dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas dan uji multikolonieritas.

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian telah berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas dengan *skewness kurtosis* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

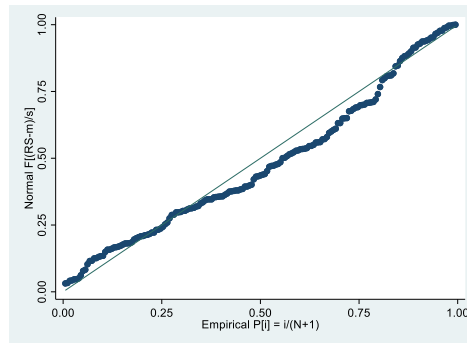
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas – *Skewness Kurtosis*

Variabel	Model 1		Model 2	
	<i>Skewness</i>	<i>Kurtosis</i>	<i>Skewness</i>	<i>Kurtosis</i>
BTD	1.11910	1.75589	1.11910	1.75589
FAM	-0.44341	-0.89418	-0.44341	-0.89418
INST	-1.30365	-1.88479	-1.30365	-1.88479
QAUD			0.91321	-1.17950
FAM*QAUD			1.52979	0.72954
INST*QAUD			1.12804	-0.54687

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat hasil pengujian normalitas melalui uji *skewness kurtosis*, yaitu pada model 1 maupun 2 besar nilai *skewness kurtosis* lebih besar dari -1.96 dan lebih kecil dari 1.96. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan penghindaran pajak tidak terjadi gangguan normalitas yang berarti data telah berdistribusi normal.

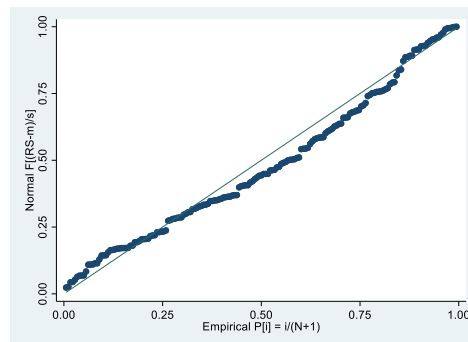
Selain analisis statistik, untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak dapat menggunakan analisis grafik, yaitu *Normal Probably Plot* dengan STATA v.16.0.



Sumber: Output STATA v.16.0

Gambar 2. Normal Probability Plot Model 1

Berdasarkan gambar di atas, pada hasil uji normalitas model 1 dapat dilihat dari grafik *Normal Probability Plot* bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya sesuai mengikuti arah garis diagonal. Oleh karena itu, berdasarkan analisis grafik dapat dikatakan data telah normal dan layak dijadikan model penelitian.



Sumber: Output STATA v.16.0

Gambar 3. Normal Probability Plot Model 2

Berdasarkan gambar di atas, pada hasil uji normalitas model 2 dapat dilihat dari grafik *Normal Probability Plot* bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya sesuai mengikuti arah garis diagonal. Oleh karena itu, berdasarkan analisis grafik dapat dikatakan data telah normal dan layak dijadikan model penelitian.

Uji multikolonieritas adalah alat untuk mengetahui keberadaan korelasi antar variabel independen pada model regresi dimana sebaiknya antar variabel independen tidak terjadi hubungan. Keberadaan multikolonieritas dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* > 0,10 atau 10% dan VIF < 10,

maka dapat dikatakan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 4. Hasil Uji VIF *Tolerance*

<i>Variable</i>	Model 1		Model 2			
			<i>Sebelum Centering</i>		<i>Sesudah Centering</i>	
	VIF	<i>Tolerance</i>	VIF	<i>Tolerance</i>	VIF	<i>Tolerance</i>
FAM	4.65	0.214835	7.09	0.141054	9.15	0.109324
INST	4.65	0.214835	7.50	0.133293	5.50	0.181983
QAUD			19.60	0.051010	16.16	0.061873
FAM*QAUD			7.04	0.142076	8.16	0.122542
INST*QAUD			17.95	0.055709	12.55	0.079658

Sumber: *Output* STATA v.16.0 dan telah diolah

Berdasarkan tabel di atas, bahwa hasil perhitungan pada model 1 menunjukkan nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, yaitu *tolerance* sebesar 0.214835 dan VIF sebesar 4.65 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Namun, hasil perhitungan model 2 menunjukkan bahwa terdapat multikolonieritas pada model penelitian. Oleh karena itu model persamaan 2 dilakukan *treatment* dengan *centering* variabel yang bermasalah, yaitu QAUD dan INST*QAUD. Nilai VIF sebelum dan sesudah *centering* untuk model 2 dapat dilihat pada Tabel 10.

Setelah dilakukan *treatment* dengan cara *centering*, nilai VIF untuk variabel QAUD dan INST*QAUD masih lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance* lebih kecil dari 10%. Menurut Winarno (2011), cara untuk mengatasi adanya multikolonieritas dengan menghilangkan salah satu variabel independen, seperti variabel yang memiliki hubungan linier yang kuat dengan variabel lain. Namun, apabila menurut teori pengurangan variabel independen tidak dimungkinkan, berarti tidak masalah jika model mengandung multikolonieritas karena estimatornya masih bersifat BLUE. Sifat BLUE tidak berpengaruh terhadap ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen. Oleh karena itu, untuk model persamaan 2 pada penelitian ini dibiarkan adanya multikolonieritas.

Pengujian koefisien determinasi digunakan guna mengukur seberapa besar persentase kemampuan variabel independen dalam model penelitian mampu menjelaskan variabel dependen. Berikut ini merupakan hasil pengujian R² yang diolah dengan menggunakan program STATA v.16.0, sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

INST*QAUD	-0.0002853	-1.25	0.211
-----------	------------	-------	-------

Keterangan: * signifikansi 1%; ** signifikansi 5%; *** signifikansi 10%.

Sumber: *Output STATA v.16.0 dan telah diolah*

Kepemilikan Keluarga dan Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 6 pada model persamaan 1, diperoleh hasil uji T yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga memiliki t_{hitung} $2.65 > 1.6535$ dengan signifikansi $0.047 < 0.05$. Dengan demikian, hipotesis pertama pada penelitian ini terbukti dan diterima yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena tingginya kepemilikan keluarga selaku pemegang saham mayoritas mampu memberi dorongan terhadap kinerja manajer dalam memutuskan kebijakan dan operasi perusahaan (Masripah, Diyanty and Fitriasar, 2015). Didukung oleh teori keagenan yang dinyatakan oleh Jensen dan Meckling (1976) bahwa tingginya persentase kepemilikan keluarga akan mendorong pemanfaatan haknya dalam proses penentuan kebijakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, yang diproyeksikan dari besarnya laba perusahaan, dengan cara meminimalkan beban pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gaaya *et al.* (2017) mengatakan bahwa kepemilikan keluarga yang tinggi akan mendorong pemegang saham lebih agresif terhadap pajak untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Perusahaan dapat menghemat beban pajak sehingga kas yang tersedia dapat digunakan untuk aktivitas yang lebih menguntungkan. Namun, hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayani (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perbedaan ini disebabkan karena penelitian Wijayani (2016) yang memiliki rata-rata kepemilikan keluarga yang relatif besar, yaitu 52,68% dengan proksi yang digunakan adalah teknik *dummy*, tetapi kepemilikan tersebut bukan kepemilikan terkonsentrasi yang berperan sebagai pengendali perusahaan, sehingga pengaruhnya terhadap penghindaran pajak tidak signifikan.

Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 6 pada model persamaan 1, hasil uji T yang menyatakan bahwa nilai t_{hitung} $2.23 > 1.6535$ dengan signifikansi $0.023 < 0.05$. Dengan demikian, hipotesis kedua pada penelitian ini terbukti dan diterima yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa investor institusi akan bertindak selaku pihak yang mengawasi

kinerja manajemen dalam pengambilan keputusan sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh manajer, salah satunya tindakan penghindaran pajak. Artinya semakin besar kepemilikan institusional pada suatu perusahaan akan mengurangi tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Krisna (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan oleh institusi yang besar maka akan semakin sulit bagi manajer untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Septiadi *et al.*, (2017). Perbedaan hasil ini disebabkan pada penelitian Septiadi *et al.*, (2017) dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan dan pertanian pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015 yang menunjukkan dengan rata-rata kepemilikan institusional yang cukup tinggi, yaitu 60,83% tidak mampu menekan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan manajer. Penghindaran pajak oleh perusahaan dilakukan untuk mendapatkan sumber dana yang berlebih, sehingga dapat digunakan untuk tindakan lain, seperti investasi ataupun untuk kesejahteraan kepemilikan institusional itu sendiri.

Kepemilikan Keluarga, Kualitas Audit, dan Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 6 pada model persamaan 2, diperoleh hasil uji T yang menyatakan bahwa nilai t_{hitung} $0.93 < 1.65376$ dengan signifikansi $0.353 > 0.05$. Dengan demikian, hipotesis ketiga pada penelitian ini tidak terbukti dan ditolak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa KAP selaku auditor eksternal, baik KAP *The Big Four* maupun KAP *Non The Big Four*, dalam melakukan proses pengauditan lebih fokus pada pedoman standar mutu yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sehingga kurang berperan dalam memperlemah hubungan kepemilikan keluarga dengan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maharani dan Juliarto (2019), yang menyatakan bahwa dengan adanya kualitas audit tidak memiliki peran pada tindakan penghindaran pajak. Hal tersebut karena penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan melainkan memanfaatkan celah-celah, sehingga sulit untuk mendeteksi adanya penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gaaya *et al.* (2017) mengatakan bahwa kualitas audit mampu memperlemah

hubungan kepemilikan keluarga dengan penghindaran pajak. Perbedaan hasil ini disebabkan pada penelitian Gaaya *et al.* (2017) dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di *Tunis Stock Exchange* (BVMT) pada periode tahun 2008-2013. Selain itu, kondisi ekonomi yang sedang mengalami masa transisi mendorong pemerintah Tunis untuk mengatasi masalah penghindaran pajak secara tegas guna menarik investor asing.

Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit, dan Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 6 pada model persamaan 2, diperoleh hasil uji T yang menyatakan bahwa nilai t_{hitung} $1.25 < 1.65376$ dengan signifikansi $0.211 > 0.05$. Dengan demikian, hipotesis keempat pada penelitian ini tidak terbukti dan ditolak. Hal ini dapat disebabkan KAP selaku auditor eksternal, baik KAP *The Big Four* maupun KAP *Non The Big Four*, hanya memberikan opini audit atas kewajaran dari penyajian laporan keuangan perusahaan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Septiadi *et al.*, 2017). Apabila pengungkapan laporan keuangan sudah wajar, maka perusahaan akan mendapatkan opini atas kewajaran dari penyajian laporan keuangan perusahaan sehingga tidak adanya peran kualitas audit dalam memperkuat hubungan kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak.

Selain itu, berdasarkan data yang diolah oleh peneliti menunjukkan bahwa dari 177 data yang diteliti pada perusahaan manufaktur tahun 2017-2019, terdapat 51 sampel atau 28.81% yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP *The Big Four*. Sedangkan, sebanyak 126 sampel atau 71.19% yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP *Non The Big Four*. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel penelitian menggunakan KAP *Non The Big Four* untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang diyakini memiliki tingkat kualitas laporan keuangan yang rendah sehingga tidak mampu mencerminkan peran kualitas audit dalam memperkuat hubungan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian (Krisna, 2019) yang dilakukan pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016, dimana menyatakan bahwa dengan tingginya kepemilikan institusional didukung oleh kualitas audit yang baik mampu mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam penyusunan laporan keuangan

perusahaan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan manajemen untuk berniat melakukan tindakan kecurangan, seperti penghindaran pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data melalui pembuktian hipotesis, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) Kepemilikan Keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga yang mengalami kenaikan, maka penghindaran pajak juga akan meningkat. (2) Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional yang mengalami kenaikan, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan. (3) Kualitas Audit tidak memiliki peran dalam memperlemah hubungan Kepemilikan Keluarga dengan Penghindaran Pajak. Hal tersebut menunjukkan KAP *The Big Four* yang mengaudit perusahaan tidak mampu berperan dalam memperlemah hubungan kepemilikan keluarga terhadap tindakan penghindaran pajak. (4) Kualitas Audit tidak memiliki peran dalam memperkuat Kepemilikan Institusional dengan Penghindaran Pajak. Hal tersebut menunjukkan KAP *The Big Four* yang mengaudit perusahaan tidak mampu berperan dalam memperkuat hubungan kepemilikan institusional terhadap tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menambah variabel independen lain seperti, *transfer pricing*, komite audit, peraturan perpajakan dan kepemilikan manajemen. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan sektor perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memperpanjang periode penelitian sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat. (2) Bagi perusahaan manufaktur, disarankan lebih meningkatkan kinerja manajemen perusahaan serta investor institusi dalam mengawasi kegiatan perusahaan agar tindakan penghindaran pajak dapat diminimalisir sehingga reputasi perusahaan dapat terjaga. (3) Bagi investor, disarankan mengkaji terlebih dahulu kinerja suatu perusahaan, salah satunya terkait kebijakan perpajakan, karena perusahaan yang memiliki pembayaran pajak yang efektif memiliki reputasi perusahaan yang baik sehingga berdampak pada keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang.

DAFTAR RUJUKAN

- Darmawan, I. G. H. and Sukartha, I. M. (2014) 'Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), pp. 143–161.
- DeAngelo, H. and Masulis, R. W. (1980) 'Optimal Capital Structure Under Corporate and Personal Taxation', *Journal of Financial Economics*, 8(1), pp. 3–29.
- Edison, A. (2017) 'Struktur Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Pengaruhnya Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr)', *Bisma*, 11(2), pp. 164–175.
- Gaaya, S., Lakhali, N. and Lakhali, F. (2017) 'Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality', *Managerial Auditing Journal*, 32(7), pp. 731–744.
- Ghozali, I. (2018) 'Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25', in. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M. C. and Meckling, W. H. (1976) 'Theory of The Firms: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure', *Journal of Financial Economics*, 3(4), pp. 305–360.
- Khan, M., Srinivasan, S. and Tan, L. (2017) 'Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence', *Accounting Review*, 92(2), pp. 101–122.
- Krisna, A. M. (2019) 'Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi', *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, 18(2), pp. 82–91.
- Lisa, O. (2012) 'Asimetri Informasi Simetri Informasi dan Manajemen Laba', *Jurnal WIGA*, 2(1), pp. 42–49.
- Maharani, W. and Juliarto, A. (2019) 'Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating', *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(4), pp. 1–10.
- Masripah, M., Diyanty, V. and Fitriasar, D. (2015) 'Controlling Shareholder and Tax Avoidance: Family Ownership and Corporate Governance', *International Research Journal of Business Studies*, 8(3), pp. 167–180.
- Praptidewi, L. and Sukartha, I. (2016) 'Pengaruh Karakteristik Eksekutif Dan Kepemilikan Keluarga Pada Tax Avoidance Perusahaan', *E-Jurnal Akuntansi*, 17(1), pp. 426–452.
- Putri, R. K. (2015) 'Pengaruh Manajemen Keluarga Terhadap Penghindran Pajak', *Jurnal Akuntansi*, 7(1), pp. 60–72.
- Septiadi, I., Robiansyah, A. and Suranta, E. (2017) 'Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance', *Journal of Applied Managerial Accounting*, 1(2), pp. 114–133.
- Sugiarto, M. (2011) 'Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Kebijakan Dividen Terhadap

Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Hutang Sebagai Intervening’, *Jurnal Akuntansi Kontemporer*.

Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 2nd edn. Yogyakarta: PT Alfabeta.

Tandean, V. A. and Winnie (2016) ‘The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance’, *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), pp. 28–38.

Villalonga, B. and Amit, R. (2006) ‘How do family ownership, control and management affect firm value?’, *Journal of Financial Economics*, 80(2), pp. 385–417.

Wijayani, D. R. (2016) ‘Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2014)’, *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(2), pp. 181–192.

Winarno, W. W. (2011) *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews. Edisi Ketiga*, UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Winata, F. (2014) ‘Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013’, *Tax & Accounting Review*, 4(1), pp. 1–11.

Wirdaningsih, Sari, R. N. and Rahmawati, V. (2018) ‘Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak dengan Efektivitas Komisaris Independen dan Kualitas Audit sebagai Pemoderasi’, *Jurnal Akuntansi*, 7(1), pp. 15–29.